

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP
PAHAM RADIKALISME DIKALANGAN GENERASI MUDA
GUNA MEMANTAPKAN INTEGRASI BANGSA**

Oleh :

Abd. Haris, S.I.P
Kolonel Kav NRP 1920036480969

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“Peningkatan Kewaspadaan Nasional Terhadap Paham Radikalisme di Kalangan Generasi Muda Guna Memantapkan Integrasi Bangsa”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor Kep 16 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXIII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXIII tahun 2022 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Ibu Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

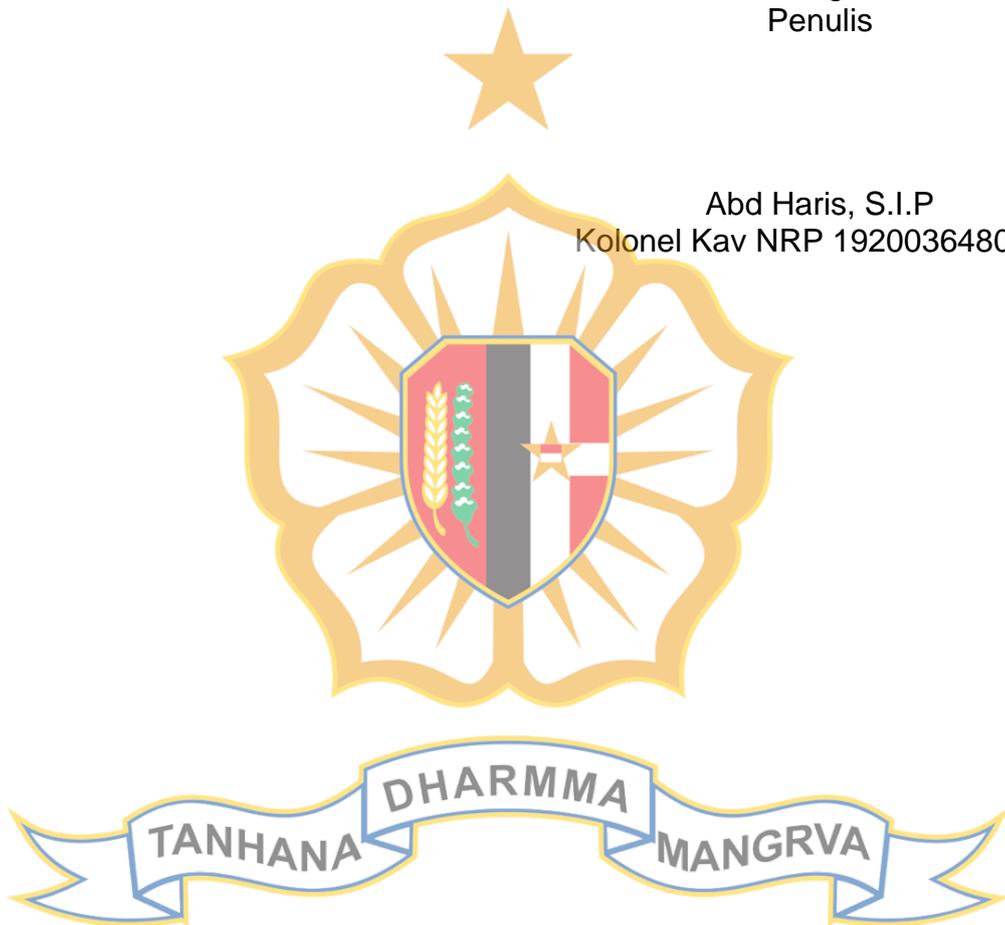
Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2022
Penulis

Abd Haris, S.I.P
Kolonel Kav NRP 1920036480969



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Haris, S.I.P
Pangkat : Kolonel
Jabatan : Pamen Mabesad
Instansi : Mabesad
Alamat : Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2022
Penulis Taskap



Abd Haris, S.I.P
Kolonel Kav NRP 1920036480969

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang Bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Abd Haris, S.I.P
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke
LXIII Tahun 2022
Judul Taskap : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL
TERHADAP PAHAM RADIKALISME DI KALANGAN
GENERASI MUDA GUNA MEMANTAPKAN
INTEGRASI BANGSA

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhanas RI Nomor 02 tahun 2022, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“coret yang tidak diperlukan.”



Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

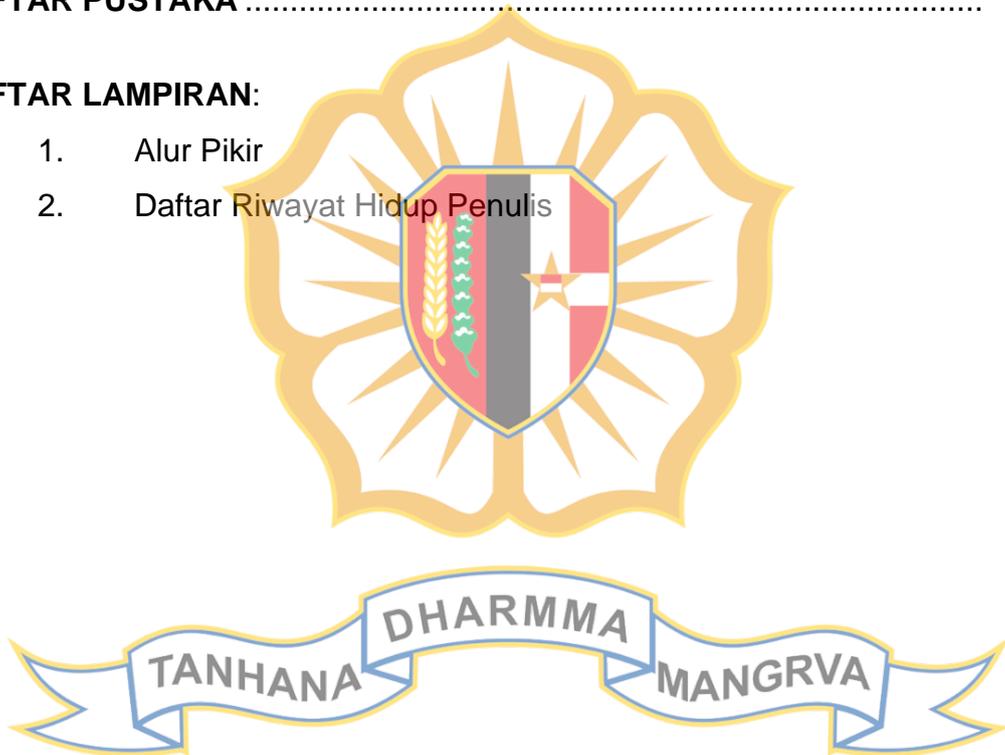
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan masalah	5
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-Undangan	9
9. Kerangka Teoritis	11
10. Data dan Fakta.....	13
11. Lingkungan Strategis	21
BAB III PEMBAHASAN	30
12. Umum	30
13. Peningkatan pemahaman hakekat ancaman dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini terhadap kewaspadaan nasional.....	31

14.	Menghilangkan bentuk primordialisme sempit dari individu, kelompok, kedaerahan dan agama dalam rangka cegah awal	38
15.	Pemantapan karakter bangsa sebagai kesadaran integral guna membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai tangkal awal.....	47
BAB IV	PENUTUP	57
16.	Simpulan	57
17.	Rekomendasi	59
	DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Alur Pikir
2. Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR. 1** SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020
GAMBAR. 2 PERBANDINGAN PERISTIWA KONFLIK



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamlirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya bangsa Indonesia belum terintegrasi secara utuh sesuai dengan yang dicita-citakan. Sehingga, integrasi nasional tersebut dapat dicermati secara kritis, proporsional dan kontekstual yang berkaitan dengan konsepsi negara nasional (*nation*) yaitu suatu negara yang didasarkan kepada ideologi nasionalisme dan didukung oleh bangsa yang utuh. Bangsa disini mengandung makna sebagai suatu entitas politik, di mana di dalamnya terdiri dari warga negara nasional yang memiliki latar belakang ras, agama, etnik dan golongan yang berbeda-beda, namun memiliki kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah bingkai negara nasional yaitu NKRI. Artinya konsep NKRI ini lahir karena adanya keinginan yang kuat dari seluruh warga bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara kesatuan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan atau integrasi. Keinginan tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 khususnya pada Alinea-2 yang berbunyi “.....dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Lingkungan strategis global, regional maupun nasional yang semakin dinamis telah menghasilkan sebuah spektrum ancaman yang sangat kompleks terhadap pertahanan negara dan senantiasa membawa perubahan yang mengganggu integritas seluruh komponen bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Spektrum ancaman yang dimaksud dapat ditinjau dari jenis, pelaku (aktor), serta sumber ancaman itu sendiri. Jenis ancaman dan tantangan tidak lagi didominasi oleh ancaman militer, namun ancaman nonmiliter juga perlu mendapat tingkat kewaspadaan dari semua pihak. Pelaku ancaman tidak terbatas hanya pada aktor negara (*state actor*), akan tetapi dari aktor non-negara (*non-state actor*), bahkan kedua ancaman tersebut dapat berkolaborasi menjadi ancaman *hybrid threat*. Bila

dipandang dari sumbernya, ada hubungan yang sangat erat antara ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Sementara itu ditinjau dari aspek dimensi ancaman, sangat mudah berkembang karena berasal satu dimensi ke dimensi lain, termasuk dimensi aspek kehidupan Astra Gatra yang meliputi aspek geografi, aspek demografi, aspek sumber kekayaan alam, aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek keamanan, aspek informasi, serta aspek teknologi. Spektrum ancaman bisa berubah-ubah, berasal dari lokal ke nasional. Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, memiliki potensi kerawanan yang diakibatkan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras serta etnis golongan, hal tadi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya permasalahan sosial. Perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks serta berjalan demikian cepat, telah memicu suatu perubahan pada seluruh tataran kehidupan serta berpengaruh kepada semakin menguatnya kesamaan dari sebagian komponen bangsa yang lebih berorientasi pada suatu kepentingan universal, dan disisi lain mengabaikan kepentingan nasional.

Globalisasi dan berbagai perubahan yang menyertainya, termasuk reformasi merupakan suatu keniscayaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Persoalan yang muncul ketika globalisasi dan reformasi disikapi secara berlebihan adalah bentuk euforia reformasi yang telah merubah kehidupan nasional menjadi kehilangan kompas, salah arah dan kebablasan sehingga kurang mewaspadaai berbagai efek ancaman yang menyertainya. Demokrasi yang kehilangan arah tidak lagi mengikuti rambu-rambu dan pedoman serta menumbuhkan sikap acuh terhadap rasa memiliki bangsa Indonesia dan menurunkan sikap waspada sebagai Bangsa Indonesia. Prasangka bahwa istilah kewaspadaan adalah seakan sekedar propaganda pemerintah untuk kembali mengendalikan perpolitikan nasional, sehingga masyarakat begitu alergi mendengar kata kewaspadaan nasional. Padahal ancaman yang dihadapi tidak lagi hanya yang bersifat fisik, ideologi dan politik saja, namun telah menyeluruh pada semua aspek kehidupan yang menyentuh ranah geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan. Ancaman yang dihadapi, tidak lagi ancaman tradisional saja, tetapi sudah non-tradisional, tidak lagi yang simetris

semata, tetapi sudah pada tingkat asimetris. Reformasi yang berlebihan, pengaruh globalisasi dan demokratisasi mengundang berbagai permasalahan baru terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yang muaranya bisa melemahkan ketahanan nasional dan ntegrasi nasional. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dasar dalam bernegara tanpa terasa mulai terkikis oleh globalisasi, reformasi dan demokratisasi yang tidak proporsional. Pada saat tertentu, pola tingkah dan sikap perilaku pemimpin yang tidak mencerminkan tauladan sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat. Konflik dan disharmoni sosial, bersumber dari perbedaan, keberagaman atau kebhinekaan yang seharusnya menjadi kekuatan strategis memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, namun terkadang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang dikemas dan dimanipulasi dengan perbedaan suku, agama, ras serta golongan (SARA). Hal tersebut juga diperparah dengan sikap perilaku elit pemimpin bangsa serta tidak meratanya pembangunan menjadi suatu kerawanan yang dapat berujung ke arah konflik sosial. Arus globalisasi yang sangat deras dan tidak dihadapi dengan proporsional perlahan-lahan telah menggerus nasionalisme, suburnya paham-paham liberal dan radikal terutama di kalangan generasi muda menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa.

Permasalahan di atas secara lambat laun akan memunculkan paham radikalisme, khususnya di kalangan generasi muda/mahasiswa. Lembaga survei Alvira Research tahun 2020 yang dipublikasikan oleh kepala BNPT pada Desember 2020 di Bali menemukan bahwa terdapat 12,2 persen atau hampir 30 jutaan penduduk Indonesia masuk dalam indeks potensi terpapar radikalisme. Satgas Pencegahan Terorisme BNPT tahun 2020-2021 menemukan sebanyak 47,3 persen pelaku terorisme adalah kelompok muda berusia 20-30 tahun. PPIM UIN Jakarta juga menunjukkan bahwa sebanyak 24,89 persen mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama yang rendah¹. Fakta tersebut menunjukkan bahwa paham radikalisme dan intoleran di lingkungan kampus adalah hal yang nyata. Radikalisme juga tidak identik dengan agama tertentu (di Indonesia sering dikaitkan dengan agama Islam), tapi bisa terjadi oleh pemeluk agama manapun sepanjang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

¹ Kompas.com. Waspada, Radikalisme Sasar Generasi Muda Indonesia, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/20/124608765/waspada-radikalisme-sasar-generasi-muda-indonesia?page=all> pada 1 Maret 2022

Semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat, sehingga harus dihadapi dengan suatu strategi yang fleksibel, aplikatif dan adaptif. Strategi tersebut harus menjelma menjadi suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian setiap warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu potensi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sikap yang sangat militan terhadap rasa nasionalisme, rasa kecintaan serta kebanggaan memiliki satu bangsa akan membangkitkan tingkat kualitas kesiapan dan kesiagaan yang tinggi bagi bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi dini, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan awal serta penangkalan awal berbagai potensi, bentuk dan sifat ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu wujud kewaspadaan nasional yang merupakan manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia terhadap keselamatan, kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI.

Kewaspadaan Nasional dibangun dari kewaspadaan individu keluarga, kelompok, komponen bangsa termasuk daerah untuk menghasilkan kualitas kesiapan dan kesiagaan mengantisipasi potensi ancaman terhadap integritas dan integrasi nasional terlebih karena kita adalah bangsa yang majemuk dan tidak akan menghilangkan kemajemukan itu. Sehingga harus diupayakan bersama dengan rasa tanggungjawab yang sebesar-besarnya adalah bagaimana mengupayakan kemajemukan itu menjadi mozaik keindonesiaan sebagai suatu kekuatan yang kohesif, bukan menjadi unsur-unsur yang menceraiberaikan Indonesia.

Fenomena-fenomena di atas menjadikan suatu ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu memerlukan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan kewaspadaan nasional terhadap paham radikalisme di kalangan generasi muda guna memantapkan integrasi bangsa. Seluruh komponen bangsa harus dapat bersatu padu menghadapi ancaman disintegrasi dalam rangka terwujudnya keutuhan NKRI.

2. Rumusan Masalah.

a. **Rumusan masalah.** Berdasarkan uraian singkat diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan naskah Taskap ini adalah : Bagaimana meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap paham radikalisme di kalangan generasi muda guna memantapkan integrasi bangsa ?

b. **Pertanyaan kajian.**

1) Bagaimana memahami hakekat ancaman dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini terhadap kewaspadaan nasional ?

2) Bagaimana menghilangkan bentuk-bentuk primordialisme sempit dari individu, kelompok, kedaerahan dan agama dalam rangka cegah awal ?

3) Bagaimana memantapkan karakter bangsa sebagai kesadaran integral dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai tangkal awal ?

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud dari penulisan taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan menganalisis peningkatan kewaspadaan nasional terhadap paham radikalisme dikalangan generasi muda guna memantapkan integrasi bangsa.

b. **Tujuan.** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan nasional terhadap paham radikalisme di kalangan generasi muda guna memantapkan integrasi bangsa.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup penyusunan taskap ini hanya dibatasi pada pembahasan terkait dengan peningkatan kewaspadaan

nasional terhadap paham radikalisme di kalangan generasi muda guna memantapkan integrasi bangsa.

b. **Sistematika.**

1) **BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang peningkatan kewaspadaan nasional guna memantapkan integrasi bangsa, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian-pengertian.

2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta dan lingkungan strategis yang mendukung penulisan dan informasi lainnya untuk mengalisis pada BAB III.

3) **BAB III PEMBAHASAN.** Pada bab ini merupakan analisis/pembahasan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertuang pada data dan fakta di bab II sampai dengan menemukan faktor penyebab masalah dalam rangka mendapatkan solusi pemecahannya.

4) **BAB IV PENUTUP.** Pada bab ini penulis menjelaskan tentang simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan ringkasan tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulisan Taskap ini. Sedangkan rekomendasi merupakan saran dari penulis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan yang dikaji.

5. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Pembahasan dan penulisan naskah ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang didasarkan pada

data-data hasil observasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengamatan di lapangan.

b. **Pendekatan.** Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan empiris dan studi kepustakaan dengan menggunakan fakta-fakta dari hasil pengamatan dan pengalaman selama bertugas guna mendapatkan landasan ilmiah serta pemecahan pokok-pokok persoalan dalam perspektif yang akan datang.

6. Pengertian.

a. **Ancaman.** Adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa².

b. **Ancaman Aktual.** ancaman nyata, berbentuk separatis bersenjata, terorisme, kelompok radikal, kelompok komunal, pencurian kekayaan alam seperti *illegal fishing*, *illegal logging* dan *illegal mining* serta bencana alam³.

c. **Ancaman potensial.** Adalah benih ancaman yang sewaktu-waktu dapat timbul seperti sengketa perbatasan, disintegrasi bangsa, konflik antar golongan, keresahan sosial, upaya penggantian ideologi Pancasila dan sebagainya⁴.

d. **Kewaspadaan Nasional.** Adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman⁵.

² Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 4.

³ Kemenhan RI, 2014. Doktrin Pertahanan Negara, h. 24

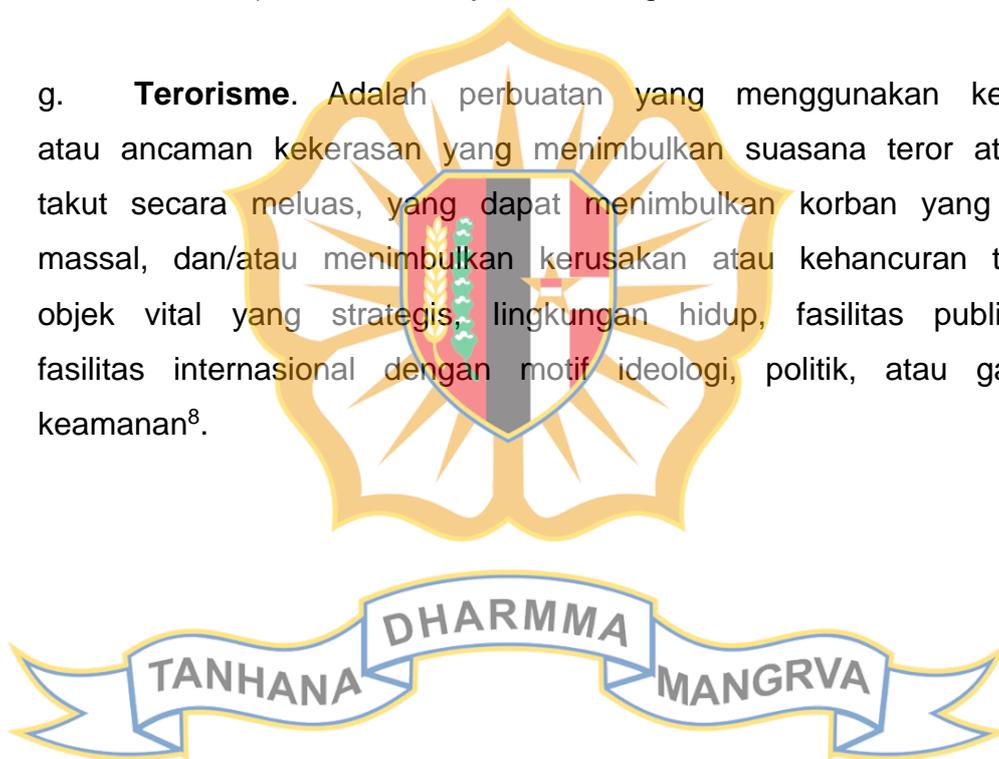
⁴ Ibid, h. 24

⁵ Lemhannas RI, 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional, h. 3

e. **Kepentingan nasional.** Adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional⁶.

f. **Radikalisme.** Merupakan sebuah paham (isme) radikal yang mengatasnamakan agama/golongan dengan kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras merubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala macam cara (kekerasan dan anarkisme) dalam mewujudkan keinginan⁷.

g. **Terorisme.** Adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan⁸.



⁶ Ibid, h. 4

⁷ Modul test CPNS, 2021. Radikalisme, diakses melalui <http://klikcpns.com/doc/MODUL%20KLIK%20CPNS%20-%20ANTI%20RADIKALISME.pdf> pada 28 Maret 2022

⁸ Undang-Undang RI No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Pasal 1 angka (2)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. **Umum.** Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai tingkat heterogenitas yang tinggi, yang ditandai dengan banyaknya suku bangsa, bermacam-macam agama, beraneka ragam budaya dan adat istiadat serta terdiri dari berbagai etnis, maka sikap kebersamaan dalam perbedaan sangat dibutuhkan. Perbedaan-perbedaan yang ada tersebut sebagaimana yang dikemukakan di atas, disadari sepenuhnya oleh para pendiri bangsa. Adapun bentuk dari kesadaran ini diwujudkan dalam sebuah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengandung pengertian walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan ini mengindikasikan, bahwa para pendiri bangsa “*The Founding Father*” kita sangat memahami suasana kebatinan bangsa Indonesia, yang walaupun mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun bahasa serta temperamen antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni bagaimana mewujudkan Indonesia Raya dikemudian hari. Rasa optimis yang begitu besar terpatri pada setiap jiwa pemimpin bangsa dan setiap individu masyarakat Indonesia, diwujudkan dengan kebulatan tekad memproklamkan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas dasar pemikiran inilah, maka pembahasan ini ditujukan bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional guna memantapkan integrasi bangsa, karena salah satu persoalan bangsa yang akhir-akhir ini mengemuka, bahkan menjadi semacam “hantu” adalah fenomena yang mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa.

8. **Peraturan Perundang-undangan.**

- a. Undang-Undang RI No. 7 tahun 2012 tentang Konflik Sosial. Lahirnya perundang-undangan ini memberikan mandat kepada aparat penegak hukum untuk mengatasi aksi-aksi yang mengarah kepada konflik sosial harus berdasarkan kepada kemanusiaan, HAM, kekeluargaan, kebangsaan, kesetaraan gender, kepastian hukum, ketertiban, dan selalu berlandaskan kepada Bhineka Tunggal Ika. Artinya di dalam menghadapi berbagai fenomena ATHG yang mengarah terancamnya integrasi bangsa

harus berlandaskan kepada norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan ini.

b. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 39 tentang HAM tahun 1999 dalam pasal 68 dinyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Menurut pasal tersebut pembelaan negara didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Manusia merupakan makhluk di muka bumi yang memiliki kesadaran, sebab tanpa kesadaran manusia tidak memiliki orientasi (arah) tentang apa yang dilakukan itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau tidak indah dan seterusnya. Kesadaran sangat berkaitan dengan hati nurani. Hati nurani merupakan penghayatan manusia tentang baik dan buruk atau berkaitan dengan moral. Sehingga kesadaran tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dasar, yaitu kebebasan, kesamaan, dan keadilan.

c. Permendagri No. 71 tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Dalam pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa penyelenggaraan PWK bertujuan untuk “mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. PWK merupakan suatu wadah atau organisasi kelompok kerja yang bertugas untuk mengembangkan cara pandang masyarakat bangsa Indonesia dalam rangka memahami diri dan lingkungannya. Artinya, peraturan ini mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan wawasan kebangsaan kepada seluruh warganya, terutama para ASN baru, organisasi kemasyarakatan serta seluruh pelajar sesuai dengan strata pendidikannya. Tujuan dari pendidikan wawasan kebangsaan ini adalah untuk meningkatkan cara pandang tentang diri dan lingkungannya. Sehingga seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia umumnya dapat mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

9. Kerangka Teoritis.

a. **Teori kepentingan nasional.** Menurut Paul Spykman, secara normatif kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kumpulan cita-cita bangsa yang berupaya dicapainya melalui hubungan dengan bangsa-bangsa lain atau dengan kata lain sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap. Donald E. Nuechterlin menyatakan bahwa kepentingan nasional meliputi empat jenis yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional dan kepentingan ideologi. Sedangkan menurut K.J. Holsti, kepentingan nasional dapat di klasifikasikan *Core Values*, kepentingan nasional adalah sesuatu yang vital bagi suatu negara dan menyangkut eksistensi bangsa; *midle range objectives*, kepentingan negara adalah menyangkut suatu kebutuhan untuk memperbaiki derajat perekonomian; dan *long range goals*, sebagai sesuatu yang bersifat ideal, seperti mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia⁹.

b. **Teori tentang *Lebensraum* (Ruang Hidup).** *Lebensraum* adalah teori tentang bangsa yang diawali oleh adanya pemikiran dari pemikir Jerman Fiedrich Ratzel, yang mengemukakan teori organisme negara, bahwa negara merupakan sebuah mahluk hidup yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sehingga bila semakin besar perkembangan dan pertumbuhannya, diperlukan tempat hidup yang lebih luas. Teori ini menjadi ilham bagi Adolf Hitler yang bertema *lebensraum* atau ruang hidup, dimana rakyat Jerman dalam perkembangannya membutuhkan tempat yang lebih luas agar dapat hidup. Ruang yang dimaksud oleh Hitler adalah Eropa Timur¹⁰.

c. **Teori *national security*.** Keamanan nasional merupakan suatu konsep yang dirumuskan dalam rangka menghadapi ancaman agresi atau invasi militer dari negara lain yang ingin menguasai wilayah nasional suatu negara. Untuk menghadapi ancaman tradisional dan bersifat fisik ini, biasanya negara mempersenjatai diri dengan alat-

⁹ Lemhannas RI, 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional, h. 31

¹⁰ Lemhannas RI, 2022. Bidang Studi Wasantara, h. 25

alat perang yang canggih dan mengirim pasukannya ke wilayah-wilayah perbatasan untuk menghalau musuh agar supaya musuh tidak bisa masuk ke batas wilayah nasionalnya¹¹.

d. **Teori konsensus nasional.** Dalam pandangan bangsa Indonesia, konsensus nasional merupakan kesepakatan bersama dalam mendirikan sebuah negara kebangsaan yang dapat memwadahi seluruh komponen bangsa Indonesia dengan perbedaan etnis, suku, budaya dan agama dan tersebar diseluruh wilayah Nusantara. Konsensus nasional bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga konsensus nasional ini perlu dipahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional¹².

e. **Teori Geopolitik/Geostrategi.** Teori geopolitik/geostragi dalam naskah ini tidak terlepas dari pandangan Presiden pertama Indonesia tentang geopolitik. Dimana Bung Karno menyatakan bahwa geopolitik adalah hubungan antara letak tanah dan air dengan rasa dan kehidupan politiknya. Berdasarkan teori ini, maka para pendiri bangsa ini merumuskan sebuah konsep tentang bangsa, dimana dapat dimaknai bahwa bangsa adalah suatu entitas politik yang terdiri dari warga negara, yang walaupun berbeda etnik, ras, budaya, agama, golongan satu sama lain, tetapi punya kehendak yang sama untuk bersatu di bawah payung negara nasional. Akan tetapi integrasi nasional tidak dapat terwujud dengan sendirinya, akan tetapi hanya akan terwujud melalui suatu upaya yang berlanjut yakni integrasi seluruh komponen negara dan bangsa¹³. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geostrategi, dimana terdapat tahapan dan fase-ase sejarah umat manusia yang memiliki problematikanya dan dijawab oleh negara dengan munculnya berbagai kebijakan. Artinya geopolitik dan geostrategi adalah sebagai dasar bagi negara untuk menentukan sebuah kebijakan.

¹¹ Untuk memahami Paradigma Human Security dan relevansinya bagi Indonesia dapat dibaca pada Anak Agung Banyu Perwita, "Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia, *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003, No. 1, hlm. 70 – 76.

¹² Lemhannas RI, 2022. Bidang Studi Konsensus Dasar (Bhineka Tunggal Ika), h. 1

¹³ Lemhannas RI, 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional, h. 7

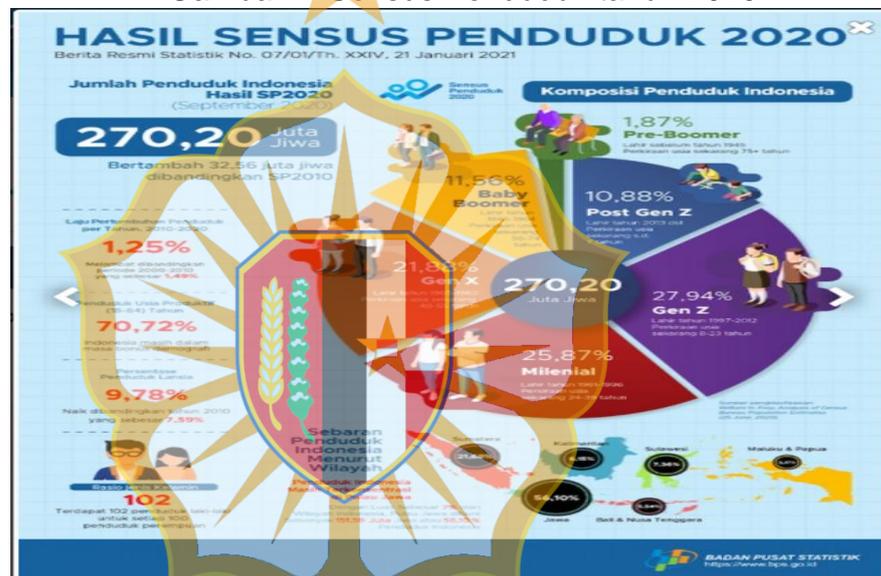
10. **Data dan Fakta.**

a. **Memahami hakekat ancaman dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini terhadap kewaspadaan nasional.** Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman non militer menimbulkan sebuah kerawanan terhadap integrasi bangsa. Terlebih dengan multikulturalnya bangsa Indonesia, ancaman disintegrasi bangsa dapat menjadi ancaman faktual yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kurangnya pemahaman terhadap hakekat ancaman merupakan salah satu gambaran bahwa rasa kebangsaan masyarakat Indonesia menurun. Rasa kebangsaan adalah salah satu bentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan pemiliknya. Untuk satu tujuan yang sama, mereka membentuk lagu, bendera, dan lambang. Untuk lagu ditimpali dengan gendang yang berpengaruh dan trompet yang mendayu-dayu sehingga lahirlah berbagai rasa. Untuk bendera dan lambang dibuat bentuk serta warna yang menjadi cermin budaya bangsa sehingga menimbulkan pembelaan yang besar dari pemiliknya. Dalam kebangsaan kita mengenal adanya ras, bahasa, agama, batas wilayah, budaya dan lain-lain. Tetapi ada pula negara dan bangsa yang terbentuk sendiri dari berbagai ras, bahasa, agama, serta budaya. Rasa kebangsaan sebenarnya merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, dan disegani di antara bangsa-bangsa di dunia. Kondisi rasa kebangsaan saat ini ditinjau sesuai pengertiannya yakni sebagai pendorong munculnya kecintaan pada bangsa dan negara serta keinginan kuat untuk menjadi perekat kebangsaan dari satu *nation-state* dengan ciri masyarakatnya yang plural dan heterogen dinilai sedang mengalami kemerosotan, hal tersebut tampak pada permasalahan sebagai berikut :

- 1) Sikap individualisme. Kita sangat mengenal ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia dengan adanya modernisasi dan globalisasi pada saat ini melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks telah membuat bangsa Indonesia kehilangan

kepribadiannya sebagai bangsa yang kaya akan unsur budaya.¹⁴ Sehingga memunculkan sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2021 penduduk bangsa Indonesia berjumlah \pm 273 juta jiwa, sebanyak 27,94% total penduduk Indonesia merupakan bagian dari generasi Z (Gen Z), 25,87% sebagai generasi milenial dan 21,88% merupakan generasi X (Gen X). Berikut gambaran sensus penduduk Indonesia tahun 2020 berdasarkan data dari BPS.

Gambar 1. Sensus Penduduk tahun 2020



Sumber. BPS Indonesia tahun 2021 (telah diolah kembali)

Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Gen Z merupakan penduduk bangsa Indonesia yang lahir antara tahun 1997-2012, penduduk milenial masyarakat yang lahir tahun 1981-1996, dimana kedua generasi ini merupakan generasi yang paling produktif dan mendominasi persebaran demografi di Indonesia dan dunia. Sehingga akan jelas tercipta perbedaan dalam cara pandang, kepercayaan, pengalaman, dan nilai-nilai hidup tentang bagaimana menjalani kehidupan di zaman sekarang. Hal ini akan mengubah wajah kultur Indonesia menjadi lebih menunjuk kata

¹⁴Yusup Nugraha, *Sifat Individualisme di Kalangan Masyarakat*, Diakses tanggal 31 Agustus 2015, lihat : <http://yusupnugraha94.blogspot.com/2013/12/individualis.html>

“saya” bukan “kami” (lebih individualisme). Ditambah dengan adanya faktor-faktor lainnya yang mendukung perubahan tersebut, contohnya perkembangan ekonomi (GDP), modernisasi, dan faktor lainnya¹⁵. Sikap individualisme ini bila terus dipupuk di generasi milenial (sebagai calon-calon pemimpin nasional dimasa depan) akan menimbulkan ke-egoan yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Hal tersebut, tentunya akan merubah sistem kenegaraan yang pada akhirnya akan timbul konflik-konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

2) Hilangnya nilai-nilai persatuan. Hal ini bisa dilihat dengan masih muncul konflik komunal yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Masih terjadi konflik yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2021 terdapat 138 peristiwa konflik sosial dengan rincian sumber konflik adalah Poleksosbud terdapat 117 peristiwa, sengketa lahan/batas wilayah terdapat 17 kasus, sengketa SDA ada 3 kasus dan distribusi SDA ada 1 kasus¹⁶. Kondisi ini tentunya akan terus berkembang apabila seluruh masyarakat Indonesia tidak memahami hakekat ancaman.

Di era digital, khususnya para generasi muda bangsa, pemahaman terhadap ancaman radikalisme semakin memudar. Hal ini ditengarai oleh menurunnya rasa patriotisme, nasionalisme serta bela negara para generasi muda. Dimana semua itu lebih dimaknai sebagai pemahaman kegiatan yang bersifat fisik saja dan merupakan tanggung jawab aparat negara. Kondisi ini disebabkan perkembangan teknologi di era milenial yang sangat pesat, sehingga mempengaruhi terhadap pola pikir dan pola tindak para generasi muda bangsa Indonesia. Sehingga ancaman nyata terhadap jati diri bangsa tidak dapat dipahami secara mendalam. Berkaitan

¹⁵ Kumparan.com. Apakah Kultur Indonesia Bertransformasi menjadi Individualis ?, diakses melalui <https://kumparan.com/talumaaulana07/apakah-kultur-indonesia-bertransformasi-menjadi-individualis-1vTCUZTAhuU/3> pada 22 April 2022.

¹⁶ Kemendagri, 2022. Peta Konflik Sosial Didaerah, disampaikan pada pelatihan peningkatan kepemimpinan perempuan perdamaian pada tanggal 28 Maret 2022.

dengan hal ini, Dwi Hartono menegaskan bahwa ancaman nyata para generasi muda bangsa saat ini adalah narkoba, pornografi (HIV/LGBT/AIDS), hoax dan aksi radikalisme. Dari penelitiannya yang dituangkan dalam sebuah jurnal, menyatakan bahwa aksi kekerasan dan radikalisme di dunia pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut : 84% siswa pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah, 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah, 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru merupakan pelaku kekerasan, sampai dengan 48,9% siswa Jabodetabek setuju aksi radikal. Tercatat sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 lalu kejadian radikalisme yang dilakukan oleh para pelajar adalah kasus teror di Klaten (2011) dan Solo (2015), peristiwa di Medan (2016), kasus anak sekolah setingkat SMA berangkat ke Syria di Jakarta (2016) dan terjadinya kasus rentetan teror di Surabaya (2016)¹⁷. Hal tersebut mengindikasikan bahwa radikalisme dapat mengancam lingkungan pelajar atau dunia pendidikan. Apabila para generasi muda bangsa tidak dapat memahami ancaman tersebut, maka sudah dimungkinkan di masa yang akan datang tindak radikalisme semakin tidak terkendali.

b. **Bentuk-bentuk primordialisme sempit dari individu, kelompok, kedaerahan dan agama dalam rangka cegah awal.** Masih adanya bentuk-bentuk primordialisme sempit dari kelompok, kedaerahan dan agama merupakan salah satu bentuk kurangnya pemahaman kebangsaan masyarakat Indonesia. Paham kebangsaan mencakup kepehaman tentang ruang negara. Kesadaran terhadap ruang negara biasanya tertuang dalam geopolitik negara, yang secara mudah di Indonesia dapat dipahami sebagai wawasan nusantara yang dapat ditafsirkan sebagai keutuhan ruang, kelestarian ruang dan kenyamanan ruang. Sesuai dengan tantangan yang dialami bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, maka paham kebangsaan termanifestasikan dalam makna Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh Pemuda-Pemuda Indonesia pada tahun 1928. Sumpah

¹⁷ Hartono, Dwi, 2020. Fenomena Kesadaran Bela Negara di era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhanas RI.

pemuda dijadikan sebagai pembangkit kesadaran tokoh pemuda saat itu, untuk bersatu melawan penjajah. Sumpah pemuda dapat mengkrystalkan nilai-nilai kedaerahan pada waktu itu dan mengembangkan semangat kebersamaan dalam keberanekaragaman. Hal inilah yang merupakan dasar pada paham kebangsaan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa Indonesia. Namun saat ini kesadaran masyarakat Indonesia sudah sangat menurun bahkan paham kebangsaan seolah-olah menjadi tidak relevan dalam berbagai wacana membangun bangsa karena terdistorsi praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Indikator paham kebangsaan dalam Taskap ini antara lain :

1) Ideologi. Globalisasi yang ditandai dengan kemudahan memperoleh informasi global secara real time membuat jargon “Demokrasi Pancasila” menjadi kehilangan pamor apabila disandingkan dengan demokrasi gaya “Barat” (*liberalism*) yang dipahami sebagai nilai demokrasi yang universal. Demokrasi Pancasila kehilangan legitimasinya karena dianggap hanya dirancang untuk melegitimasi suatu penguasa. Selanjutnya yang terjadi adalah kebebasan yang cenderung euphoria yang ditunggangi intrik-intrik petualang politik yang membawa bangsa ini kehilangan jatidirinya. Contohnya, saat ini timbul berbagai ormas, front dan kelompok-kelompok tertentu yang mengganggu ketertiban sosial. Sementara itu, internet menjadi ladang subur untuk mengungkapkan unek-unek, yang seringkali bernada hoax. Bila tidak hoax, paling tidak kelompok-kelompok tersebut mengungkapkan pendapat (liar) yang membawa nama demokrasi sebagai tiket menuju kebebasan¹⁸.

2) Kehidupan Politik. Sistem multi partai yang berkembang di Indonesia, menurunnya moral dan etika kebangsaan dapat menimbulkan kerawanan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, karena tidak mampu memberikan dorongan terciptanya kehidupan

¹⁸ Demokrasi yang terjun bebas, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, diakses melalui <https://ukwms.ac.id/demokrasi-yang-terjun-bebas/> pada 12 April 2022.

Demokrasi Pancasila. Berbagai masalah politik yang masih dipecahkan bersama oleh bangsa saat ini seperti pemberlakuan otonomi daerah, pemisahan TNI dan Polri belum terselesaikan secara tuntas, menimbulkan kerawanan dengan konflik sosial berkepanjangan dan menurunnya kewaspadaan nasional.

3) Kehidupan Ekonomi. Kebijakan perekonomian Negara yang tidak memperhatikan wawasan kebangsaan dengan melaksanakan eksploitasi sumber daya nasional dengan tidak memperhatikan kelangsungan hidup bangsa. Eksploitasi tidak memperhatikan dampak yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, bencana alam dan timbulnya kesenjangan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh adalah hasil laporan kunjungan kerja Wakil Ketua IV DPR RI pada 17 November 2021 lalu ke Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim terdapat kerusakan lahan dan hutan serta pencemaran lingkungan sebagai akibat penambangan PT Pacific Prima Coal Indonesia¹⁹.

4) Kehidupan Sosial Budaya. Nilai-nilai budaya gotong royong, kesediaan untuk saling menghargai dan saling menghormati perbedaan serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa yang dulu melekat kuat dalam sanubari masyarakat yang dikenal sangat kental terasa makin menipis. Pergeseran ini telah menimbulkan konflik nilai kebersamaan dimana nilai kekeluargaan akan dikesampingkan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Hubungan yang tidak harmonis antara penguasa dengan rakyat menimbulkan pendangkalan terhadap jati diri dan budaya bangsa. Sebagai contoh adanya ujaran yang menyinggung bahasa suatu daerah oleh seorang anggota legislatif yang memicu adanya berbagai aksi unjuk rasa, khususnya di daerah Jawa Barat

¹⁹ Dpr.id, 2021. Komisi IV Tinjau Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu bara di Kaltim, diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36496/t/Komisi+IV+Tinjau+Kerusakan+Lingkungan+Akibat+Penambangan+Batu+Bara+di+Kaltim> pada 12 April 2022.

yang diakibatkan ketersinggungan. Demikian juga dengan adanya ujaran kebencian terhadap salah satu wilayah sampai dengan gejolak masyarakat di wilayah Lumajang, Jawa Timur akibat ulah seorang oknum menendang “sesajen” yang merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat. Hal tersebut akan menjadikan masyarakat lain menyimpan dendam yang sewaktu-waktu muncul kepermukaan. Contohnya adalah peristiwa pemukulan terhadap salah seorang penggiat sosial pada saat aksi demonstrasi 11 April 2022 lalu yang menolak isu tiga periode masa jabatan presiden²⁰. Hal ini diindikasikan adanya suatu dendam dari masyarakat sehingga memicu terjadinya aksi pemukulan.

5) **Pertahanan Keamanan.** Bentuk ancaman terhadap kedaulatan Negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multidimensional yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Beberapa daerah di wilayah Indonesia berusaha untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI dengan membentuk laskar-laskar yang berinduk pada partai/golongan tertentu, serta menggunakan lambang dan bendera separatis.

Terlepas dari fakta diatas, menurut BNPT adanya bentuk primordialisme sempit dari individu, kelompok, kedaerahan dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menimbulkan aksi radikalisme, khususnya para generasi muda. Data menunjukkan mulai tahun 2000 hingga saat ini, para pelaku aksi radikalisme melalui bom bunuh diri di berbagai wilayah Indonesia berusia antara 18-30 tahun, yang artinya generasi muda sangat rentan menjadi radikal²¹. BNPT mencatat 85 persen kaum milenial sangat

²⁰ Wartaekonomi. Dihajar massa saat demo mahasiswa, Begini Sepak terjang Sosok Ade Armando, diakses melalui <https://wartaekonomi.co.id/read408007/dihajar-massa-saat-demo-mahasiswa-begini-sosok-dan-sepak-terjang-ade-armando-bukan-kaleng-kaleng> pada 12 April 2022

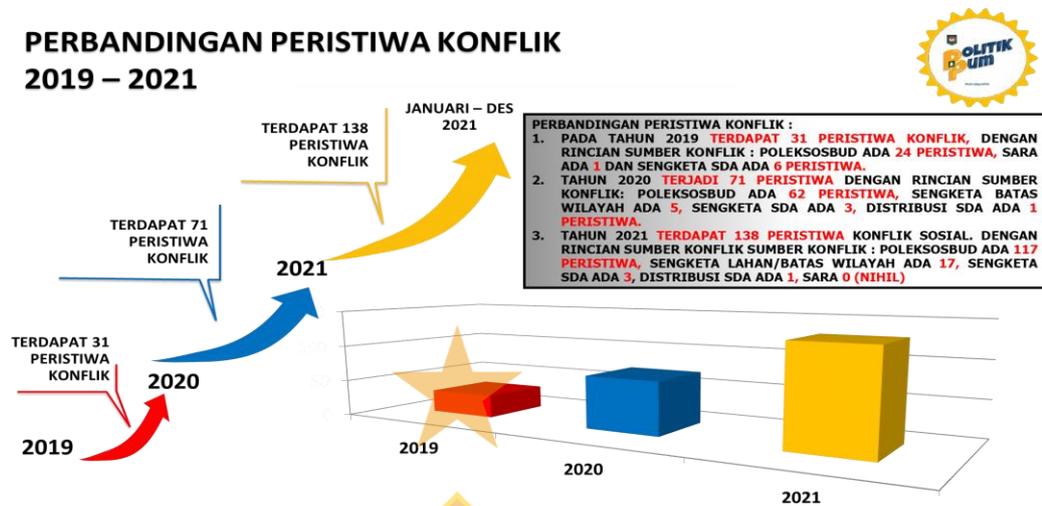
²¹ BNPT. Lindungi generasi Muda Dari Paham Radikal, diakses melalui <https://www.bnpt.go.id/lindungi-generasi-muda-dari-paham-radikal-bnpt-ajak-pendidik-agama-sebarkan-pesan-toleransi-dan-perdamaian-kepada-anak> pada 12 April 2022

rentan terpapar paham radikalisme dan terorisme, dimana 47,3 % pelaku tindak terorisme dari kalangan generasi muda²².

c. **Karakter bangsa sebagai kesadaran integral dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai tangkal awal.** Berubahnya karakter bangsa tidak terlepas dari paham kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kondisi bangsa yang pluralisme atau kebhinekaan memerlukan suatu pengelolaan yang baik, sehingga tidak menjadi ancaman bagi keutuhan dan kesatuan bangsa. Semangat Kebangsaan yang ada saat ini tidak ditransformasikan kepada bagian lain secara terpola sebagai perekat kesatuan. Menurunnya tingkat semangat kebangsaan dikhawatirkan akan menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa akan dapat dielakkan. Berkembangnya budaya materialistik telah merambah pedesaan, bahwa segala hal yang dikerjakan diukur secara materi sehingga tidak perlu lagi ada rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan jiwa patriotisme, yang penting adalah kepentingan pribadi. Pada tatanan kehidupan bernegara banyak dijumpai partai politik yang hanya memberikan janji-janji palsu dan mengatas namakan kepentingan rakyat, namun implementasinya pasca Pemilihan Umum belum juga terealisasi. Merosotnya nilai kebangsaan dan rasa nasionalis terlihat dari pola sikap dan pola tindakan. Di tengah semakin kaburnya wujud dan bentuk ancaman yang berkembang dewasa ini, kerapuhan jiwa dan menurunnya kewaspadaan nasional merupakan potensi ancaman terbesar bagi keberlangsungan dan keutuhan bangsa. Hasil dari semua ini adalah munculnya sebuah konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, seperti pada gambar berikut :

²² BNPT, 85% Kaum Milenial Rentan Terpapar Radikalisme dan Terorisme, diakses melalui <https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/85-kaum-milenial-rentan-terpapar-radikalisme-dan-terorisme/> pada 12 April 2022

Gambar. 2 Perbandingan Peristiwa Konflik



11. **Lingkungan Strategis.** Pengaruh perkembangan lingkungan strategis bukan merupakan fenomena baru dalam perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Globalisasi dan perkembangan yang terjadi di lingkungan global, regional maupun nasional merupakan suatu proses yang bergerak dengan intensitasnya semakin lama semakin tinggi dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan kewaspadaan nasional guna memantapkan integrasi bangsa, sebab setiap negara dan bangsa memiliki jati diri yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa-bangsa lainnya, termasuk Indonesia.

a. **Perkembangan Lingkungan Global.**

- 1) **Teknologi digital.** Era globalisasi telah melahirkan berbagai lompatan modernisasi, tidak terkecuali teknologi digital yang sangat pesat seperti media sosial, media informasi dan komunikasi. Teknologi digital memberikan kemudahan bagi seluruh umat manusia didunia untuk saling berinteraksi tanpa ada batasan. Namun, perkembangan teknologi digital ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun dan meningkatkan kewaspadaan nasional guna memantapkan integrasi bangsa, karena telah mendorong diseminasi (penyebaran) informasi yang tanpa batas. Sehingga diperlukan

adanya inovasi dan adaptasi dari seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dalam pemanfaatan teknologi digital.

2) Globalisasi ekonomi. Yang paling terasa dari pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, terutama dengan pasar bebasnya adalah batas negara seolah tidak ada lagi, melalui tekanan ekonomi, negara-negara kuat memaksakan kehendaknya, bukan saja dibidang ekonomi, tetapi juga dibidang politik, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Implikasi lain dari globalisasi ekonomi, adalah tumbuhnya budaya konsumerisme yang menggejala pada masyarakat mulai dari kota hingga ke desa. Padahal kondisi perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan besar. Namun di satu sisi, globalisasi ekonomi telah mendorong negara-negara berkembang untuk bersaing dengan negara-negara maju. Sehingga mendorong negara-negara tersebut untuk berinovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Adanya dampak negatif dari globalisasi ekonomi ini mengisyaratkan bahwa pemerintah suatu negara bangsa tidak akan mudah mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan dan perilaku dunia usaha meskipun berlangsung diwilayah negara sendiri. Ketimpangan ekonomi mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, yang dapat dimungkinkan akan memicu munculnya aksi-aksi radikal.

3) Liberalisasi perdagangan dunia. Usaha liberalisasi perdagangan dunia dilakukan melalui pengurangan kewenangan pemerintah untuk mengontrol ekspor dan penghapusan hambatan tarif maupun non tarif, melalui WTO (*World Trade Organisation*). Dengan diberlakukannya ketentuan WTO, berarti kemenangan bagi perusahaan transnasional yang berbasis teknologi maju. Sebaliknya bagi negara-negara berkembang yang menghasilkan produksi industri berbasis pada sumber daya alam menjadi tersisihkan. Keadaan ini menimpa negara berkembang, yang 50%

PDB-nya (Pendapatan Domestik Bruto) berasal dari komoditi alam, sehingga selalu kalah dalam bersaing dan semakin bergantung kepada negara maju, termasuk Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun, yang pada akhirnya memicu adanya konflik-konflik sosial yang berujung kepada tindakan radikal.

4) Demokratisasi. Gencarnya gelombang demokratisasi, keterbukaan, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, perdagangan bebas dan senjata pemusnah massal, telah mendorong timbulnya pandangan kontroversial kontemporer yang cenderung bersifat eksklusif. Hal ini mendorong tumbuh dan berkembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / *Non Governmental Organization* (NGO) dan terbentuknya organisasi baru *Non territorial government*, *Non territorial transnational* dan *Non territorial multi national* yang dapat menembus otoritas yang telah ada dan mampu menerobos batas-batas fisik antar negara. Namun disatu sisi, demokratisasi ini dapat menjadi pendorong bagi kemantapan demokrasi di Indonesia, apabila mampu dikelola dengan baik. Sehingga akan mempengaruhi terhadap pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat. Apabila dapat dikelola dan diimplementasikan dengan baik, maka ide-ide disintegrasi bangsa dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan.

5) Kelangkaan energi. Minyak bumi, gas, dan batubara diprediksi masih akan mendominasi pasar energi dunia hingga 23 tahun ke depan. Energi fosil seperti minyak, gas, dan batubara akan tetap mendominasi pangsa pasar energi, yang masing-masing mendapat porsi 27%. Dengan kata lain, tiga macam energi fosil ini masih akan menguasai 81% pasar energi primer dunia, hingga 2035. Khusus bagi Indonesia cadangan bahan bakar fosil diperkirakan tinggal untuk 16 tahun lagi. Saat ini kebutuhan AS mencapai 20-25 % energi dunia dan ke depan prediksi pertumbuhan

kebutuhan energi Tiongkok dan India akan mencapai 56 % dari kebutuhan dunia²³. Bagi Indonesia, kelangkaan energi akan berdampak terhadap timbulnya potensi konflik dan kebutuhan energi ini dapat berimbas terhadap ketahanan nasional termasuk ancaman keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa. Namun disatu sisi, kelangkaan energi dunia dapat memberikan kontribusi apabila Indonesia mampu mengelola sumber daya energi yang dimiliki yang dapat menjadikan pendapatan negara. Sebaliknya, apabila pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya energi yang dimiliki, akan memicu terjadinya kesenjangan dan konflik di dalam kehidupan masyarakat, di mana pada muaranya akan memicu tumbuhnya paham radikalisme.

b. **Perkembangan Lingkungan Regional.**

1) **Stabilitas regional Asia Tenggara.** Secara umum stabilitas regional Asia Tenggara relatif dinamis terkendali, sehingga negara-negara di kawasan ini mampu meningkatkan pembangunan ekonominya masing-masing. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam memelihara stabilitas regional melalui kerangka kerjasama Hankam di Asia Tenggara dalam bentuk pengaturan bersama keamanan regional (*Regional Security Arrangement*) yang dituangkan ke dalam berbagai Forum antara lain ZOPFAN, *Declaration of Asean Concord (DAC)*, *Treaty of Amity Cooperation in South East Asia (TACA)* dan *Asean Regional Forum (ARF)* maupun patroli terkoordinasi di selat Malaka (EIS) secara konkrit telah mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap ketertiban dunia umumnya, stabilitas regional Asia Tenggara khususnya atas dasar keterbukaan, saling pengertian dan kebersamaan. Kondisi ini akan memberikan dampak positif terhadap meningkatnya rasa bela negara masyarakat Indonesia. Akan tetapi, bila pemerintah Indonesia tidak dapat

²³ Duniaenergi.com. Pasar Energi Masih Akan Didominasi Minyak, Gas dan Batubara hingga 2035, diakses melalui <https://www.dunia-energi.com/pasar-energi-masih-akan-didominasi-minyak-gas-dan-batubara-hingga-2035/> pada 14 April 2022

menjadi motor penggerak stabilitas keamanan regional akan memicu terjadinya konflik kawasan, yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Sehingga peningkatan kewaspadaan nasional guna memantapkan integrasi bangsa merupakan salah satu pilar untuk mematri jati diri bangsa tersebut.

2) Ancaman Disintegrasi. Pada era global sekarang ini, banyak negara yang mengalami ancaman disintegrasi, dengan mengemukakan masalah ketidakadilan, kesukubangsaan, kedaerahan dan sentralistik kekuasaan. Perkembangan ini dapat diamati secara cermat, misalnya di Eropa, terpecahnya Cekoslovakia menjadi dua negara, di Afrika seperti di Somalia, Sudan, dan di Asia seperti, Irak, Afganistan²⁴ dan Indonesia, mengindikasikan terjadinya disintegrasi. Artinya dimana-mana di belahan dunia, integritas nasional tampak dalam tantangan serius. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang multikultur, apabila pemerintah tidak dapat mengelola perbedaan yang ada. Namun sebaliknya, dengan keberagaman yang dimiliki dapat dikelola dengan baik, mampu menjadikan kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia mencegah munculnya disintegrasi bangsa.

c.

Perencanaan Lingkungan Nasional

1) Geografi. Kondisi geografi Indonesia yang sangat strategis, menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai lalu lintas Internasional, terutama untuk kepentingan ekonomi dan perdagangan antar negara. Kondisi geografi tersebut, selain memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi dan perdagangan Indonesia, juga akan berpengaruh negatif. Kondisi geografi yang berupa kepulauan akan menyulitkan pengawasan dari

²⁴ Ruangguru.com. Peristiwa Kontemporer Dunia, diakses melalui <https://www.ruangguru.com/blog/peristiwa-kontemporer-dunia-perpecahan-cekoslovakia> pada 14 April 2022

pemerintah terhadap perkembangan paham radikalisme, khususnya di kalangan generasi muda yang dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa.

2) Demografi. Penduduk Indonesia yang hampir berjumlah 270 juta jiwa, merupakan potensi yang sangat besar dalam upaya membangun bangsa guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Masalah kependudukan yang besar bagi Indonesia dipandang sebagai modal dasar bangsa bagi pembangunan nasional serta merupakan komponen dasar dalam Sishankamrata. Namun pluralitas dan penyebaran penduduk merupakan masalah yang serius untuk mendapatkan kewaspadaan dalam kaitan pembangunan kekuatan Hankam negara. Kualitas penduduk dan kondisi kesejahteraan yang belum merata dalam pelaksanaan pembangunan nasional merupakan masalah tersendiri, yang berkaitan dengan keamanan dan memudahkan masuknya paham-paham radikalisme, khususnya di kalangan generasi muda.

3) Sumber Daya Alam (SDA). Potensi kekayaan alam Indonesia merupakan modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pengelolaan yang kurang efektif dan upaya penegakkan hukum yang masih lemah terhadap para pelaku penambang liar, mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara, baik berupa kerusakan lingkungan maupun kerugian pendapatan negara. Bila hal tersebut tidak segera ditangani secara terpadu antar lembaga terkait, akan memberikan peluang kepada kelompok-kelompok yang selama ini memanfaatkan situasi dan kondisi dengan menghembuskan paham radikalisme di kalangan generasi muda untuk menentang kebijakan pemerintah. Sehingga diperlukan adanya ketegasan hukum dari pemerintah terhadap pelanggaran hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, sebagai salah satu wujud dari pemantapan kewaspadaan nasional.

4) Kondisi Sosial.

a) Ideologi. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih tetap dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada tataran implementasi, masih belum sepenuhnya dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, sehingga masih ada kelompok tertentu yang menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai media dalam proses perjuangan kelompoknya. Nilai-nilai praksis Pancasila sering juga diperdebatkan yang justru sangat rawan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri secara hakiki, akibatnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Oleh karena itu, perlu untuk diantisipasi terhadap setiap perkembangan yang dapat mengarah kepada rendahnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Nasional. Sementara itu sosialisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka masih memerlukan kerja keras melalui upaya revitalisasi aspek idealis, realistik dan fleksibilitasnya. Di lain pihak pengaruh pesatnya paham liberal dan isu global dengan didukung derasnya informasi telah menimbulkan adanya golongan tertentu yang mencari nilai-nilai ideologi alternatif yang baru yang bisa saja bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itu dalam dinamika kehidupan bangsa senantiasa perlu diwaspadai kemungkinan bergesernya nilai-nilai kejuangan bangsa, yang mengakibatkan berkembangnya paham-paham radikalisme.

b) Politik. Hubungan lembaga-lembaga politik baik dalam tataran supra struktur, infra struktur dan sub struktur dalam mekanisme politik meskipun sudah mulai menampakkan kemapanannya namun belum secara sinergis dapat membangun kehidupan politik yang stabil. Elit kekuasaan dan elit partai cenderung mengutamakan dan

berorientasi kepada kepentingan partai. Hal ini memicu terjadinya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, khususnya para generasi muda. Sehingga, para generasi muda tersebut mudah diprovokasi melalui penanaman paham radikal untuk menentang kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemantapan kewaspadaan nasional perlu menjadikan prioritas pemerintah dalam menjaga integrasi bangsa.

c) Ekonomi. Paska gelombang pandemi covid 19 melanda negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia, kondisi makro ekonomi negara secara umum terlihat mambaik dengan memperhatikan beberapa indikator ekonomi nasional dalam kurun waktu belakangan ini. Hal ini berdasarkan data BPS yang menyatakan sampai dengan bulan Maret 2022 terjadi inflasi sebesar 0,66 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,95²⁵. Akan tetapi, kondisi perekonomian masyarakat sedang diguncang oleh harga kebutuhan pokok yang selalu meningkat. Misalnya kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM, hal ini akan memicu terjadinya daya beli masyarakat menurun dan apabila dibiarkan akan memicu terjadinya konflik yang mengarah kepada aksi radikal. Namun dengan adanya kewaspadaan nasional yang selalu dipupuk, diharapkan seluruh masyarakat memiliki rasa persatuan yang tangguh.

d) Sosial Budaya. Kemerosotan sendi-sendi kehidupan sosial budaya yang berkaitan dengan moral dan etika yang merusak kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan tingkat kehidupan sosial, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan yang masih rendah ikut mempengaruhi kesiapan bangsa Indonesia

²⁵ Bps.go.id. Infralsi terjadi pada Maret 2022 sebesar 0,66%, Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 1,86%, diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/04/01/1859/inflasi-terjadi-pada-maret-2022-sebesar-0-66-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-merauke-sebesar-1-86-persen-.html> pada 14 April 2022.

memasuki era global. Banyak penduduk yang masih tergolong miskin dan adanya wilayah dan daerah tertentu yang sulit menerima nilai baru karena fanatisme dan etno sentris. Kondisi ini juga memudahkan kelompok tertentu untuk menanamkan paham radikalisme terhadap masyarakat. Namun, dengan adanya budaya luar dapat menjadi unsur pengaya kebudayaan lokal, bila dikelola dengan baik. Sehingga pemantapan kewaspadaan nasional terhadap masuknya budaya luar harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa dalam menjaga integrasi bangsa.

e) Pertahanan dan keamanan. Kondisi keamanan dalam negeri saat ini masih cukup memprihatinkan seperti aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat dan mahasiswa setiap saat dapat terjadi dimana saja, khususnya ketika terjadi unjuk rasa. Salah satu contohnya adalah ketika unjuk rasa mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang telah menimbulkan berbagai fenomena kekerasan di lapangan. Hal tersebut membuktikan bahwa rakyat sangat rentan dari provokasi pihak tertentu untuk memecah belah bangsa. Untuk itu, pemantapan kewaspadaan nasional yang optimal akan meningkatkan deteksi dini, tangkal awal dan peringatan awal terhadap munculnya paham radikalisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan.



BAB III

PEMBAHASAN

12. **Umum.** Dalam bab terdahulu telah diuraikan bahwa Wawasan Kebangsaan generasi muda menunjukkan indikasi kuat meluntur, yang diikuti ikatan-ikatan kebersamaan sebagai satu bangsa yang semakin rapuh. Dampak krisis multidimensi ditambah pandemi covid 19 yang telah memberikan berbagai dampak negatif dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah, lapangan kerja sangat kurang, mengakibatkan pengangguran meningkat. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi masyarakat dalam euphoria reformasi, memunculkan berbagai sikap yang mengarah pada tindakan anarkis, dan kurang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan kesadaran politik masyarakat dipenuhi oleh ambisi untuk mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Masalah disintegrasi bangsa menjadi perhatian sekaligus sumber kekhawatiran yang mendesak untuk diselesaikan baik yang ada di kalangan generasi muda, maupun pada unsur masyarakat lainnya. Kekhawatiran itu tidak hanya bersumber pada tuntutan pemisahan diri sebagian masyarakat tertentu seperti di Papua, tetapi juga sangat mungkin berkembang paham-paham radikalisme khususnya di kalangan generasi muda. Gambaran pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa generasi muda bangsa Indonesia sangat rawan terpapar paham-paham radikalisme, khususnya di kalangan kampus. Sifat generasi muda yang masih mencari jati diri merupakan factor yang mempengaruhi rentannya terpapar paham radikalisme. Terlebih saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak globalisasi. Sehingga mudah diprovokasi oleh kelompok-kelompok radikal dengan berbagai isu yang dapat menyulut pikiran untuk melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah dan bahkan ideologi negara. Bahkan tidak sedikit aksi-aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh para generasi muda berakhir dengan tindakan anarkis.

Dengan demikian sangat dibutuhkan upaya membangkitkan kesadaran seluruh generasi muda guna memantapkan integrasi bangsa dengan membangun

kembali kewaspadaan nasional agar pola pikir, pola tindak dan pola sikap dapat dijadikan sebagai panutan, keteladanan yang merupakan calon pemimpin nasional di masa mendatang. Hal ini merupakan wujud deteksi dini, peringatan dini, cegah awal dan tangkal awal terhadap kewaspadaan nasional.

13. Peningkatan pemahaman hakekat ancaman dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini terhadap kewaspadaan nasional. Kondisi kewaspadaan nasional yang diharapkan dari generasi muda bangsa Indonesia adalah terwujudnya kesadaran akan deteksi dan peringatan dini terhadap adanya ancaman terhadap NKRI dan setiap individu manusia Indonesia memiliki rasa berbangsa dan bernegara yang tinggi serta memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kondisi inilah yang akan dapat membawa bangsa Indonesia maju ke depan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Keberhasilan bangsa Indonesia untuk merdeka pada masa perjuangan lalu adalah karena ketiga hal tersebut di atas yang secara penuh dimiliki oleh insan manusia Indonesia pada masa itu. Sehingga keinginan untuk merdeka dapat terwujud meskipun banyak sekali keterbatasan dan tantangan yang menghambat proses bangsa Indonesia menuju merdeka. Sedangkan pada saat ini, para generasi muda harus sadar bahwa ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara sangat tinggi, sehingga perlunya kewaspadaan dalam menjaga kepentingan nasional.

Menurut Paul Spykman, secara normatif kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kumpulan cita-cita bangsa yang berupaya dicapainya melalui hubungan dengan bangsa-bangsa lain atau dengan kata lain sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap. Donald E. Noecheerlin menyatakan bahwa kepentingan nasional meliputi empat jenis yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional dan kepentingan ideologi. Sedangkan menurut K.J. Holsti, kepentingan nasional dapat di klasifikasikan *Core Values*, kepentingan nasional adalah sesuatu yang vital bagi suatu negara dan menyangkut eksistensi bangsa; *middle range objectives*, kepentingan negara adalah menyangkut suatu kebutuhan untuk memperbaiki derajat perekonomian; dan *long range goals*, sebagai sesuatu yang bersifat ideal, seperti mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia²⁶.

²⁶ Lemhannas RI, 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional, h. 31

Berdasarkan teori tersebut, dapat dipahami bahwa generasi muda dituntut untuk dapat memahami ancaman radikalisme dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, muaranya adalah mengancam terhadap integrasi bangsa.

a. Ancaman terhadap ideologi. Berkembangnya paham radikalisme akan mengancam terhadap ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Karena hancurnya kehidupan berbangsa dan bernegara secara pasti akan dimulai dari hancurnya fundamental bangsa tersebut. Idealnya, masyarakat suatu bangsa khawatir akan kondisi fundamental bangsanya yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa sebagai alat pemersatu karena berasal dari akar budaya bangsa. Dengan demikian maka kondisi yang diharapkan pada masyarakat Indonesia adalah timbulnya kesadaran dari masyarakat Indonesia bahwa Pancasila saat ini telah mulai terancam oleh masuknya ideologi lain sehingga Pancasila mulai banyak ditinggalkan dan dilupakan oleh anak bangsa di era reformasi ini. Banyaknya anggota DPR ataupun DPRD yang nyata-nyata berasal dari keluarga mantan Parpol terlarang (PKI) namun pada kenyataannya terpilih secara mutlak mewakili suatu daerah pada dasarnya menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia memang menghendaki wakil mereka adalah orang yang berasal dari Komunis. Singkatnya, penambahan anggota DPR/DPRD yang berasal dari putera-puteri mantan Tapol G 30S PKI menunjukkan bahwa terdapat penambahan signifikan masyarakat yang nyaman dengan ideologi non Pancasila. Ancaman nyata lainnya yang saat ini telah mulai hadir membayangi Pancasila dan sudah mulai berkembang adalah militansi agama, primordialisme, kapitalisme dan komunisme yang hampir tidak lagi secara sembunyi-sembunyi menggeser posisi Pancasila sebagai fundamental bangsa tanpa bisa dicegah. Diharapkan masyarakat Indonesia secara penuh sadar terhadap ancaman yang telah didepan mata tersebut.

b. Ancaman terhadap politik. Kondisi yang diharapkan dari generasi muda pada aspek politik ini adalah sadar dan mengerti bahwa radikalisme membawa beberapa dampak negatif yang dapat menjadi ancaman di

perpolitikan nasional pasca reformasi. Ancaman tersebut dapat merusak tatanan kehidupan dan mengancam kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang telah disiapkan oleh para pendiri bangsa. Dampak radikalisme yang identik dengan penurunan moral mendorong kelompok masyarakat tertentu untuk menggunakan jalur politik seperti lembaga politik DPR/MPR menjadi media mereka untuk memaksakan kehendak sesuai kepentingannya sehingga mereka tidak lagi mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dengan kesadaran akan adanya ancaman terhadap politik nasional maka generasi muda akan peka terhadap usaha-usaha kelompok tertentu yang secara sengaja dan sistematis mencoba menggunakan jalur politik untuk merubah falsafah bangsa, karena hanya dengan jalur politiklah fundamental bangsa dapat diubah melalui rekayasa mereka. Sebagai calon-calon pemimpin nasional di masa yang akan datang, diharapkan generasi muda sadar akan setiap potensi yang datang dari pihak manapun yang berusaha untuk menggeser tujuan perpolitikan nasional keluar dari jalur yang sudah dibangun sebelumnya. Dengan demikian kedepan tidak ada lagi "pertunjukan" yang menunjukkan adanya perang kepentingan di antara elite politik yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.

c. Ancaman terhadap ekonomi. Kondisi yang diharapkan dari aspek ancaman ekonomi adalah adanya kesadaran generasi muda terhadap masuknya globalisasi yang mengancam perekonomian nasional khususnya bidang pemikiran kapitalis yang telah mulai berangsur-angsur masuk ke dalam tata kehidupan perekonomian nasional. Krisis multidimensional yang terjadi pada era 90an telah menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa sektor perekonomian mampu menciptakan krisis besar yang melibatkan seluruh aspek dengan dampak ikutan yang sangat luar biasa baik dari ekonomi itu sendiri maupun terhadap sektor lain seperti politik dan kepemimpinan nasional. Diharapkan dengan adanya pelajaran pada masa lalu pasca hantaman krisis serta didukung pandemi covid 19 yang telah mempengaruhi terhadap perekonomian, generasi muda Indonesia dapat lebih faham dan waspada dengan hadirnya ancaman

ekonomi yang dapat menghancurkan semua sektor. Generasi muda diharapkan dapat mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitasnya mengembangkan sektor perekonomian masyarakat sebagai benteng kekuatan ekonomi nasional.

d. Ancaman terhadap sosial budaya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kesadaran pada generasi muda di Indonesia telah terjadi distorsi dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara akibat masuknya budaya asing ataupun budaya global yang saat ini sudah mulai menggeser nilai-nilai lokal. Bergesernya budaya lokal yang nyaris hilang dan digantikan budaya universal yang sangat berbeda dari nilai budaya akan secara langsung mengancam nilai-nilai luhur bangsa yang akan memudahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya kesadaran akan adanya ancaman tersebut dapat mendorong masyarakat lain di Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang dahulu berkembang di antara masyarakat seperti budaya malu, atau budaya Timur yang sangat kental agar tidak berubah menjadi masyarakat Indonesia yang keras, radikal dan sering berkonflik. Dengan adanya kesadaran akan hadirnya ancaman Sosbud tersebut maka generasi muda bangsa dapat secara mandiri akan mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia khususnya pada masa-masa mendatang.

e. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Hal yang diinginkan adalah terciptanya pemahaman generasi muda terhadap adanya ancaman yang mengarah langsung maupun tidak langsung terhadap pertahanan dan keamanan. Karena pertahanan dan keamanan adalah suatu sistem yang disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berarti melibatkan berbagai macam komponen bangsa, maka diharapkan generasi muda Indonesia sadar akan bentuk ancaman radikalisme yang saat ini justru mengancam sistemnya sehingga akan mempengaruhi sinergitas berbagai komponen dalam menghadapi ancaman khususnya bidang pertahanan dan keamanan. Generasi muda harus sadar bahwa urusan pertahanan negara bukan semata-mata urusan TNI, namun urusan seluruh masyarakat dan

bangsa Indonesia. Sehingga tidak memandang semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi ancaman militer tidak dipandang sebagai militerisasi dan pemahaman bela negara dipandang sebagai keikutsertaan dalam menghadapi peperangan.

Dari penjabaran diatas dapat diartikan bahwa semangat persatuan bangsa perlu tetap dikembangkan di kalangan generasi muda di dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk meningkatkan pemahaman para generasi muda terhadap hakekat ancaman dalam rangka deteksi dan peringatan dini dapat dilakukan melalui :

a. Peningkatan rasa kebangsaan di kalangan generasi muda sebagai salah satu bentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan, yang mendorong munculnya kecintaan kepada bangsa dan negara, serta sebagai perekat kebangsaan Indonesia yang memiliki perbedaan suku, ras, agama, sosial budaya, dan adat istiadat. Oleh karenanya, diharapkan :

1) Hilangnya sikap individualisme. Dengan hilangnya sikap individualisme diharapkan dapat meningkatkan kepedulian antar perilaku sesama warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Tumbuhnya sikap kewaspadaan nasional. Dengan tumbuhnya sikap kewaspadaan nasional diharapkan dapat memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI sehingga dapat menjadi pemicu tumbuhnya rasa nasionalisme

3) Munculnya nilai-nilai persatuan. Hal ini bisa dilihat dengan makin muncul konflik komunal yang terjadi diengah masyarakat Indonesia yang berlatar belakang SARA.

4) Terwujudnya Identitas Bangsa. Diharapkan dengan terwujudnya identitas bangsa maka :

a) Pada saat upacara bendera, diharapkan banyak rakyat yang memahami dan memaknai arti dari upacara tersebut.

b) Pada peringatan hari-hari besar nasional, seperti Sumpah Pemuda, diharapkan dianggap bukan sebagai

seremonial dan hiburan saja tetapi dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam benak mereka.

c) Diharapkan generasi muda lebih tertarik terhadap produk buatan dalam negeri, dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia.

d) Diharapkan kesadaran masyarakat bangga untuk memasang bendera di depan rumah, kantor atau pertokoan.

b. Penguatan Paham Kebangsaan sesuai dengan makna Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Makna sumpah pemuda harus tertanam di dalam diri generasi muda Indonesia saat ini maupun dimasa yang akan datang, karena sangat relevan dalam membangun bangsa Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan di diami oleh berbagai suku, ras, agama, sosial budaya, dan adat istiadat. Untuk menguatkan paham kebangsaan (khususnya di kalangan generasi muda), diharapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih berkompetisi sehingga paham ideologi diharapkan dapat memberikan daya tarik mempunyai dampak langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Meningkatnya moral dan etika kebangsaan diharapkan dapat mencegah disintegrasi bangsa karena mampu memberikan dorongan terciptanya kehidupan Demokrasi Pancasila

3) Kebijakan perekonomian Negara diharapkan dapat memperhatikan wawasan kebangsaan dengan melaksanakan eksploitasi sumber daya nasional dengan memperhatikan kelangsungan hidup bangsa

4) Nilai-nilai budaya gotong-royong, kesediaan untuk saling menghargai dan saling menghormati perbedaan serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa diharapkan senantiasa melekat kuat dalam sanubari masyarakat Indonesia.

5) Meningkatnya pemahaman terhadap ancaman bagi kedaulatan Negara diharapkan dapat mencegah beberapa daerah di wilayah Indonesia yang berusaha untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.

c Peningkatan semangat kebangsaan. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan diharapkan akan timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme yang terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Semangat Kebangsaan yang mantap merupakan motivasi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Sehingga diharapkan hal-hal sebagai berikut :

1) Semangat Kebangsaan yang ada saat ini dapat ditransformasikan kepada bagian lain secara terpola sebagai perekat kesatuan guna meningkatkan semangat kebangsaan sehingga ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa akan dapat dielakkan.

2) Semangat kebangsaan Indonesia yang mengatas namakan bangsa dan negara dapat membanggakan bangsa Indonesia.

3) Lahirnya berbagai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di dunia, dapat menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan jiwa patriotisme, sehingga seluruh komponen bangsa dapat saling bersatu padu dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan.

4) Nilai-nilai semangat kebangsaan dan nasionalisme penyelenggara negara, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Indonesia, dapat memotivasi kesamaan pola pikir, pola tindak dan pola sikap generasi muda dalam mempersatukan bangsa Indonesia.

d. Terbentuknya kualitas wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang pada tiga bidang, yakni bidang politik, ekonomi dan sosial budaya/agama diharapkan mampu membangkitkan rasa nasionalisme bangsa dalam

rangka persatuan dan kesatuan bangsa dengan senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Sejalan dengan pengembangan pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi muda yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka diharapkan Kualitas pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi muda dapat menjadi panutan guna mengembangkan Jiwa Nasionalisme.

1) Kualitas pola pikir generasi muda. diharapkan mempunyai pola pikir yang inklusif dan pro aktif sehingga generasi muda dapat menyerap dengan baik aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang majemuk.

2) Kualitas pola sikap yang ditampilkan oleh generasi muda diharapkan dalam kondisi bangsa seperti saat ini harus mampu mengantarkan masyarakat dari ketergantungan (*dependency*) menuju kemerdekaan yang selanjutnya menjadi saling membutuhkan dan saling ketergantungan (*interdependensi*) secara demokratis dengan cara jujur terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, jujur terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, serta tulus untuk melakukan kerjasama dengan orang lain dan sesama generasi muda.

3) Kualitas pola tindak generasi muda diharapkan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat lainnya kearah yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama dalam mewujudkan kewaspadaan nasional guna membangkitkan Jiwa Nasionalisme dan mencegah disintegrasi bangsa.

14. **Menghilangkan bentuk primordialisme sempit dari individu, kelompok, kedaerahan dan agama dalam rangka cegah awal.** Munculnya primordialisme sempit dari individu, kelompok, kedaerahan dan agama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bentuk-bentuk lunturnya nasionalisme dan patriotisme. Hal tersebut menjadi suatu kenyataan di era

perkembangan teknologi dan informasi yang semakin massif, khususnya di kalangan generasi muda. Lembaga pendidikan sebagai pusat belajar tidak lagi menyentuh materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan sikap patriotisme dan nasionalisme. Walaupun ada, hanya terbatas pada pembelajaran tertentu saja seperti Pelajaran Kewarganegaraan. Semestinya banyak celah-celah di lembaga pendidikan yang dapat dijadikan untuk memantapkan rasa nasionalisme para peserta didik yang merupakan generasi muda bangsa. Sejatinya kurikulum pendidikan yang digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari strata terendah sampai dengan strata tertinggi memberikan muatan tentang peningkatan rasa nasionalisme dan patriotisme secara integralistik terhadap peserta didiknya untuk memahami tentang makna sebagai sebuah bangsa.

Dalam teorinya, bangsa Indonesia adalah bagian dari ruang hidup (*lebensraum*) yang selalu mengalami perubahan, perkembangan dan pertumbuhan seiring dengan perkembangan jaman. Disamping itu, para generasi muda juga perlu mamahami tentang geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia dengan benar. Bung Karno menyatakan bahwa geopolitik adalah hubungan antara letak tanah dan air dengan rasa dan kehidupan politikanya. Berdasarkan teori ini, maka para pendiri bangsa ini merumuskan sebuah konsep tentang bangsa, dimana dapat dimaknai bahwa bangsa adalah suatu entitas politik yang terdiri dari warga negara, yang walaupun berbeda etnik, ras, budaya, agama, golongan satu sama lain, tetapi punya kehendak yang sama untuk bersatu di bawah payung negara nasional. Akan tetapi integrasi nasional tidak dapat terwujud dengan sendirinya, akan tetapi hanya akan terwujud melalui suatu upaya yang berlanjut yakni integrasi seluruh komponen negara dan bangsa²⁷. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geostrategi, dimana terdapat tahapan dan fase-ase sejarah umat manusia yang memiliki problematikanya dan dijawab oleh negara dengan munculnya berbagai kebijakan. Artinya geopolitik dan geostrategi adalah sebagai dasar bagi negara untuk menentukan sebuah kebijakan.

Tumbuhnya primordialisme sempit dari individu, kelompok, kedaerahan dan agama, disebabkan para generasi muda bangsa tidak memahami secara benar bagaimana rasa berbangsa dan bernegara harus dibangun, serta bagaimana geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia diciptakan. Para generasi muda

²⁷ Lemhannas RI, 2022. Bidang Studi Kewaspadaan Nasional, h. 7

kurang memahami paham kebangsaan yang sejatinya telah disepakati oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1928 saat kongres sumpah pemuda yang disepakati sebagai ikatan dalam berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya munculnya primordialisme sempit dari individu, kelompok, kedaerahan dan agama akan memicu timbulnya paham radikalisme. Karena sikap Primordialisme adalah paham yang memandang daerah asalnya lebih baik dari daerah lain. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), primordialisme diartikan sebagai pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya²⁸.

Sejatinya tahap pasca 1928 adalah proses penyempurnaan faham kebangsaan yang telah dicetuskan oleh para pendahulu dan telah ditanamkan oleh para “pendiri bangsa” sebagai dasar-dasar yang mengikat dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia yang didasari oleh rasa berbangsa dan bernegara, merupakan titik awal dalam membangun bangsa dan negara menuju cita-cita bersama yang dapat dicapai oleh seluruh aspek yang ada, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam.

a. Aspek Ideologi. Generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap memedomani Pancasila sebagai pedoman dasar di tengah-tengah era digital yang penuh dengan tekanan terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila yang telah dibangun oleh para pendahulu. Pancasila justru digunakan sebagai pedoman untuk menghadapi tekanan terhadap kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, karena Pancasila adalah berasal dari kultur asli bangsa Indonesia yang disarikan dari seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila betul-betul dijadikan semangat dalam membangun bangsa Indonesia karena adanya keyakinan yang tinggi bahwa hanya Pancasila lah yang menjadikan seluruh bangsa dan negara bersatu untuk menghadapi masa depan menuju cita-cita bangsa.

²⁸ Detik.dom. Pengertian Sukurisme, Chauvinisme, primordialisme dan ekstremisme, diakses melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5641700/pengertian-sukuisme-chauvinisme-primordialisme-dan-ekstremisme> pada 10 Mei 2022

b. Aspek politik. Generasi muda Indonesia pada umumnya dan elit politik pada khususnya, sadar bahwa politik di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, bukan politik liberal ataupun politik lain selain Pancasila yang bukan berasal dari kultur bangsa Indonesia sendiri. Rusaknya kehidupan politik di Indonesia yang secara langsung mengganggu tata kehidupan di Indonesia adalah disebabkan oleh rasa berbangsa dan bernegara yang telah bergeser dari pemahaman yang belum sempurna terhadap Pancasila. Dengan demikian Generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin nasional di masa depan, dapat secara penuh dan utuh memahami Pancasila yang disarikan oleh para pendiri bangsa.

c. Aspek ekonomi. Generasi muda sebagai calon-calon pemimpin nasional di masa depan, harus kembali menempatkan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan roda perekonomian nasional. Sehingga dapat kembali mengaktifkan perekonomian masyarakat menengah kebawah seperti yang diharapkan dalam pembukaan UUD 45. Roda perekonomian yang dilandasi oleh rasa berbangsa dan bernegara yang kental secara pasti akan dapat bertahan di tengah-tengah krisis ekonomi dunia karena landasan tersebut berasal dari kesamaan persepsi dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka perekonomian nasional tidak lagi didominasi oleh sistem konglomerasi namun didasarkan pada UKM, sehingga ekonomi Indonesia akan mampu bertahan ditengah krisis. Kesadaran akan berbangsa dan bernegara yang berasal dari Pancasila sebagai *the way of life* akan membantu bangsa Indonesia untuk kembali kepada ekonomi kerakyatan.

d. Aspek sosial budaya. Walaupun jaman telah berubah, budaya-budaya lokal yang pada jaman kemerdekaan menjadi penyemangat perjuangan dapat berkembang dan dipertahankan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kehidupan berbangsa dan bernegara saat itu dapat memompa semangat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga keinginan untuk merdeka dan melepaskan diri dari pengaruh penjajah. Dengan adanya resistensi dari generasi muda terhadap budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya lokal

akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberi tempat pada kearifan atau nilai-nilai dari budaya lokal yang baik yang pada masa perjuangan telah teruji dapat memberikan warna pada perjuangan. Berbagai permasalahan bangsa yang bersumber dari aspek sosial budaya seperti konflik sosial, tindakan radikal, intoleransi budaya dan sebagainya, pada hakekatnya akan mudah diatasi apabila kearifan atau nilai-nilai lokal dapat terjaga. Sehingga semangat kehidupan gotong royong dan tolong menolong dapat mendorong seluruh anak bangsa keluar dari konflik dan bukan justru saling menjatuhkan. Lebih lanjut bahwa situasi dan kondisi nasional yang sopan, agamis dan damai akan menguatkan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada lagi pembunuhan etnis ataupun perkelahian yang menimbulkan korban jiwa karena permasalahan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

e. Aspek pertahanan dan keamanan. Dalam aspek ini sejatinya generasi muda Indonesia dapat menjwai setiap pemikiran untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman yang mungkin timbul. Generasi muda tidak lagi berpikiran sektoral yang mementingkan diri sendiri, namun generasi muda yang benar-benar mengutamakan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional serta mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan TNI dalam rangka menggerakkan kekuatan pertahanan sebagai amanat UU No 34/2004 tentang TNI. Rasa berbangsa dan bernegara pada aspek pertahanan dan keamanan ini diharapkan dapat memosisikan TNI sebagai komponen utama yang secara utuh mampu menghadapi ancaman militer yang mungkin timbul sehingga TNI benar-benar mampu menjalankan tugasnya. Pada aspek ini dibutuhkan adanya semangat patriotisme dan nasionalisme para generasi muda yang selalu dapat terjaga dan tidak hanya muncul ketika ada ancaman terhadap NKRI saja, namun setiap saat dapat mengobarkan semangat tersebut bergabung ke sektor lain yang menguntungkan sebagai bentuk kewaspadaan nasional.

Dari penjabaran diatas dapat dipahami bahwa peningkatan kewaspadaan nasional guna memantapkan integrasi bangsa merupakan tindakan nyata dari para generasi muda dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Semangat persatuan dan kesatuan bangsa tersebut perlu tetap dikembangkan dalam memelihara kesatuan negara dalam wadah NKRI dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi globalisasi dengan tidak menghilangkan eksistensi dan perbedaan budaya dari berbagai-bagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Eksistensi dan perbedaan budaya di kalangan suku-suku bangsa Indonesia harus dilihat sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai beban yang harus dipertentangkan seperti saat ini. Dengan demikian akan dapat dicapai kondisi kewaspadaan nasional yang diharapkan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang berkembang dalam rangka mewujudkan integrasi bangsa.

Sebagai tindakan cegah awal dengan menanamkan rasa berbangsa dan bernegara untuk menghilangkan sikap primordialisme kedaerahan, agama dan kelompok di kalangan generasi muda dengan cara mengkompulir/mengumpulkan seluruh sejarah perjuangan bangsa menjadi bentuk yang paling sederhana dan mudah dimengerti, menentukan instansi yang berwenang untuk menanganinya dan melakukan sosialisasi kepada publik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Mengkompulir atau mengumpulkan seluruh sejarah perjuangan bangsa menjadi bentuk yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Rasa berbangsa dan bernegara tumbuh secara alamiah karena adanya kesamaan budaya, sejarah dan aspirasi perjuangan yang membuahkan semangat untuk maju bersama dari situ akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Dengan demikian agar generasi muda dapat secara mendasar tertanam rasa berbangsa dan bernegaranya, maka generasi muda Indonesia harus mengerti sejarah dan aspirasi perjuangan pada zaman kemerdekaan.

b. Menentukan instansi yang berwenang. Agar tidak terjadi saling tunggu dan saling menyalahkan, maka Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai instansi yang bertanggung jawab menanamkan rasa berbangsa dan bernegara yang secara profesional mampu menggunakan sejarah pada masa lalu sebagai sarana penanaman rasa berbangsa dan bernegara tersebut. Hal tersebut sangat penting mengingat

belum ada satupun instansi yang secara tersirat maupun tersurat menangani penanaman rasa berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini “bergerak sendiri” untuk menuju tujuannya sendiri tanpa arah yang jelas. Hilangnya program-program implementasi Pancasila pada era sebelum reformasi yang dahulu turut berperan dalam upaya menanamkan rasa berbangsa dan bernegara dengan profesional perlu disiapkan program pengganti yang “tidak lagi membiarkan” anak bangsa kehilangan rasa berbangsa dan bernegara. Instansi ini nantinya diharapkan memiliki kemampuan untuk mengkompulir/mengumpulkan dan mentransformasikan sejarah masa lalu kedalam bentuk yang menarik dan mudah dicerna oleh berbagai lapisan masyarakat dan berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga BPIP perlu dilengkapi dengan struktur organisasi yang melekat dan dinamis serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat provinsi, Kab/Kota.

c. Melakukan sosialisasi kepada publik, khususnya generasi muda. Pemerintah melalui BPIP dibantu instansi atau Kementerian lain membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara, membangkitkan rasa senasib sepenanggungan dan membangkitkan rasa cinta tanah air dengan memanfaatkan sejarah perjuangan masa lalu sebagai sarana sosialisasi agar semangat perjuangan 45 dalam membebaskan diri dari penjajah dapat dihadirkan pada era global saat ini. Dalam melakukan sosialisasi perlu disertai langkah-langkah atau tindakan serta strategi yang benar agar mampu membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara, rasa senasib sepenanggungan serta membangkitkan rasa cinta tanah air. Apabila boleh diasumsikan, maka pembangkitan kesadaran dapat seperti hasil orang menonton pertunjukan film horor yang menakutkan dimana para penonton setelah keluar dari gedung film merasa seolah-olah mereka turut serta dalam film, dan sebagainya. Agar sosialisasi dan pemangkitan semangat ini dapat optimal, maka perlu adanya **regulasi dari pemerintah dan DPR** yang akan memberikan dasar hukum dan kegiatan yang dilakukan kemudian tidak menyimpang dari esensi atau tujuan semula. Karena generasi muda Indonesia terdiri dari berbagai usia, profesi dan

pendidikan maka sosialisasi yang merupakan pemasyarakatan atau penyebaran informasi melalui nilai-nilai yang berlaku saat itu, perlu dilaksanakan dengan cara yang lebih menggugah dan partisipatif, antara lain dengan *focused group discussion* (FGD), *Outbound Orientation* (OBO), *Public Debate Simulation/Exercise*, atau melalui cara-cara yang lazim dikenal seperti lokakarya atau seminar yang sifatnya lebih dua arah. Secara teknis sebaiknya BPIP bertanggung jawab untuk kegiatan pentransferan pengetahuan, ilmu atau nilai-nilai tersebut diatas pada pendidikan yang diselenggarakan lewat jenjang formal dan non formal, dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan pada peserta didik serta urgensinya bagi ikatan persatuan sebagai suatu bangsa. Namun demikian hal lain yang perlu dilakukan pula adalah menggalang dukungan dari para elit politik yaitu dengan melakukan komunikasi politik untuk mendukung adanya regulasi yang dibuat dalam rangka kegiatan di atas.

d. Meningkatkan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Tengah-tengah pusaran era globalisasi, Indonesia tidak luput dari pengaruh terjadinya revolusi 4.0, dimana teknologi informasi dan komunikasi tumbuh sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan efek terhadap jalur masuk dan keluarnya berbagai informasi yang diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Revolusi industri 4.0 ini ditandai oleh adanya *cyber-fisik*, internet dan komputasi kognitif (proses pemikiran manusia kedalam bentuk dan model terkomputerisasi) maupun komputasi awan (gabungan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet). Oleh sebab itu, salah satu akibatnya adalah semakin mudahnya komunikasi jarak jauh dilakukan, semakin mudahnya informasi didapatkan.²⁹ Rendahnya literasi masyarakat dalam memahami digitalisasi ini mengakibatkan keamanan siber nasional rawan terhadap ancaman yang disebabkan kurangnya perlindungan digital untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu ancaman berupa konten-konten negatif yang

²⁹ Santoso, Iko Aulya Prabandari, 2019. Peran Siberaksi Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Untuk Mencegah Radikalisme. Jurnal Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

perkembangannya semakin marak, termasuk konten yang berisikan paham radikal. Media sosial yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dijadikan sebagai media atau sarana radikalisasi jarak jauh terhadap masyarakat yang rentan terpapar, khususnya generasi muda.

Oleh sebab itu, aparat keamanan dan penegak hukum seperti TNI dan Polri mendorong pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan upaya, mengembangkan dan mensosialisasikan “gerakan nasional literasi digital siberkreasi” yang ditujukan kepada para generasi muda. Dengan demikian, siberkreasi yang telah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai event atau kegiatan selama ini dapat lebih ditingkatkan secara berkesinambungan. Misalnya yang selama ini kegiatan tersebut bersifat nasional, namun kedepannya dapat dilakukan di tiap-tiap daerah dengan menggelar berbagai event atau kegiatan yang diminati oleh generasi muda.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan instansi keamanan dan penegak hukum (TNI dan Polri) yang tersebar diseluruh wilayah. Siberkreasi merupakan salah satu upaya preventif untuk menangkal berkembangnya paham radikalisme melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (media sosial), media massa dan sebagainya. Aparat TNI dan Polri seperti Babinsa dan Babinkamtibmas yang merupakan ujung tombak teritorial, dapat dilibatkan dalam mensosialisasikan kegiatan siberkreasi kepada warga masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan ini sekaligus dapat dijadikan sebagai kegiatan komunikasi edukatif yang merupakan bagian dari upaya *soft approach* pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme di lingkungan masyarakat, khususnya generasi muda. Kegiatan siberkreasi ini hendaknya dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia, tingkat kecamatan, tingkat kab/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Tujuannya adalah agar generasi muda disibukkan dengan membuat program atau konten-konten yang menarik untuk dilombakan. Dengan catatan program ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

15. **Pemantapan karakter bangsa sebagai kesadaran integral guna membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai tangkal awal.** Generasi muda sangat diharapkan untuk hidup berdampingan dengan generasi muda lainnya. Hal ini sangat perlu dilaksanakan karena dalam kehidupan generasi muda seringkali ada berbagai perbedaan. Perbedaan ini terjadi disebabkan oleh berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, kehidupan sosial, budaya, hingga politik. Karena adanya rasa primordialisme yang sempit terhadap sesuatu aspek akan menimbulkan suatu pemahaman yang dapat mengedepankan kekerasan atau aksi radikal disebabkan fanatisme terhadap sesuatu hal. Terlebih saat ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat dan yang dipakai oleh beragam pengguna, menyebabkan radikalisme di dunia maya semakin menjadi ancaman yang nyata. Berbagai data dan fakta yang telah diuraikan secara singkat pada bab terdahulu dan pemberitaan dari berbagai media massa, berbagai kasus tindakan radikalisme telah semakin berkembang di Indonesia seperti perusakan tempat ibadah, adanya diskriminasi maupun gerakan yang menyimpang dan melanggar dari nilai-nilai suatu agama. Apabila kondisi ini tidak dapat diselesaikan, maka akan dapat merusak para generasi muda bangsa Indonesia, yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap keamanan Nasional.

Keamanan nasional merupakan suatu konsep yang dirumuskan dalam rangka menghadapi ancaman agresi atau invasi militer dari negara lain yang ingin menguasai wilayah nasional suatu negara. Untuk menghadapi ancaman tradisional dan bersifat fisik ini, biasanya negara mempersenjatai diri dengan alat-alat perang yang canggih dan mengirim pasukannya ke wilayah-wilayah perbatasan untuk menghalau musuh agar supaya musuh tidak bisa masuk ke batas wilayah nasionalnya³⁰. Teori ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menjaga keamanan nasional dalam konteks menghadapi aksi radikalisme. Karena paham radikalisme pada tahapan yang lebih tinggi akan memicu terjadinya suatu tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan atau disintegrasi bangsa.

³⁰ Untuk memahami Paradigma Human Security dan relevansinya bagi Indonesia dapat dibaca pada Anak Agung Banyu Perwita, "Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia, *Jurnal Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003, No. 1, hlm. 70 – 76.

Untuk itu diperlukan pemantapan karakter bangsa generasi muda sebagai kesadaran integral untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai tangkal awal kewaspadaan nasional. Dimana dalam teorinya adalah para generasi muda tidak hanya menjamin kepentingan individu, akan tetapi menjamin kepentingan seluruh masyarakat di lingkungannya dalam wadah persatuan dan kesatuan. Dengan adanya peningkatan karakter bangsa para generasi muda yang merupakan bagian integral guna memantapkan nilai-nilai Pancasila akan memunculkan jati diri bangsa Indonesia yaitu semangat bersatu menjadi bangsa, kerukunan/toleransi, semangat gotong royong, semangat pantang menyerah dan musyawarah untuk mufakat.

a. Semangat bersatu menjadi bangsa. Semangat bersatu menjadi bangsa yang adalah seperti semangat yang ditunjukkan oleh pendahulu negeri pada jaman kemerdekaan dimana masyarakatnya bersatu padu untuk melawan penjajah. Mereka tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras dan antar golongan sehingga mereka dapat bersama-sama bahu membahu dengan kondisi yang sangat kontras dengan yang ada di penjajah, namun justru mampu membalikkan keadaan. Dengan adanya semangat untuk bersatu yang tinggi, maka tidak akan ada lagi permasalahan bangsa yang tidak dapat diselesaikan karena semangat bersatu menjadi bangsa pada dasarnya telah selesai setelah Sumpah Pemuda 1928 dan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Namun demikian pasca Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan RI semangat bersatu untuk menjadi bangsa justru harus lebih kuat karena harus menghadapi pengaruh global yang dapat menggeser sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempengaruhi dasar negara. Secara umum yang diharapkan kesadaran bahwa negara Indonesia didirikan secara bersama-sama oleh berbagai suku, agama, ras ataupun berbagai golongan yang karena kesamaannya secara bersama-sama membentuk bangsa sehingga berdiri negara Indonesia.

b. Kerukunan/toleransi. Kerukunan/toleransi adalah adanya semangat untuk memelihara kerukunan dengan meninggikan semangat toleransi sehingga perbedaan agama, suku bangsa, ras ataupun golongan bukan

lagi menjadi jembatan menuju konflik besar dan luas namun justru jembatan menuju pembangunan bangsa yang lebih baik. Banyaknya perbedaan di antara generasi muda khususnya, yang memang ada sejak bangsa Indonesia belum didirikan, justru akan menjadi kekayaan yang dapat meningkatkan kekuatan bangsa Indonesia melalui semangat kerukunan ataupun toleransi sehingga dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan sejajar dengan negara lain dapat lebih mudah tercapai. Pada masa mendatang tidak ada lagi konflik yang bernuansa SARA yang berkembang menjadi konflik besar yang sulit untuk diselesaikan atau berkembang menjadi konflik berdarah akibat perbedaan yang ada.

c. Semangat gotong royong. Pada masa mendatang diharapkan semangat gotong royong masyarakat Indonesia dapat berkembang lebih baik, sehingga krisis seperti berbagai permasalahan yang dialami bangsa ini dapat akan lebih mudah ditangani. Terbukti dari masyarakat pedesaan yang mempunyai semangat gotong royong tinggi ternyata justru mampu bertahan dari deraan krisis yang terjadi dan bagi kalangan masyarakat pedesaan krisis tersebut hampir tidak pernah terjadi.

d. Semangat pantang menyerah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir dari perjuangan yang pada dasarnya berasal dari semangat individu yang berjuang demi mencapai cita-cita kemerdekaan. Kondisi inilah yang diharapkan tetap ada dan terpelihara pada generasi muda Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk dapat maju dan sejajar dengan negara-negara maju. Semangat pantang menyerah adalah modal dasar yang harus dipelihara dan ditingkatkan, hal tersebut penting mengingat pada masa-masa mendatang kemungkinan adanya krisis moneter lagi yang kemudian berdampak pada krisis multidimensional yang lebih besar dapat saja terjadi, namun dengan adanya semangat pantang menyerah maka Indonesia akan lebih cepat keluar dari krisis bahkan bisa muncul menjadi negara kuat.

e. Musyawarah/mufakat. Kondisi yang diharapkan adalah adanya masyarakat yang selalu berusaha mengedepankan musyawarah untuk

mencapai mufakat apabila terdapat permasalahan di antara sesama anak bangsa. Generasi muda pada khususnya diharapkan tidak lagi berusaha memaksakan kehendaknya sendiri-sendiri dalam mengatasi setiap perbedaan, namun selalu mengedepankan musyawarah. Hal tersebut penting mengingat negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa, agama serta adat istiadat yang tentunya akan selalu terjadi perbedaan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu adanya semangat/mufakat dalam mengatasi perbedaan ataupun permasalahan, sehingga kedepan tidak lagi ada perkelahian ataupun kerusuhan yang dipicu oleh SARA sebagai bentuk radikalisme.

Untuk memantapkan karakter bangsa sebagai kesadaran integral guna membudayakan nilai-nilai Pancasila, dilakukan dengan cara menemukan permasalahan utama dari terjadinya kondisi yang ada, menentukan instansi mana yang berkompeten membidangnya dan membangun komunikasi politik dengan publik serta memupuk semangat menggunakan asas musyawarah/mufakat dalam mengatasi berbagai permasalahan.

a. Temukan permasalahan utama dari terjadinya kondisi tersebut. Langkah utama dalam upaya mengembalikan jati diri bangsa adalah menemukan pokok-pokok permasalahan yang mengakibatkan terjadinya kondisi tersebut. Adapun hal yang dilakukan adalah:

1) Tiap-tiap lembaga pemerintah mencari permasalahan utama dari sudut pandang profesinya terhadap fenomena penurunan semangat bersatu, kerukunan/toleransi, semangat gotong royong, semangat pantang menyerah dan musyawarah mufakat yang ada di masyarakat. Makin banyak sudut pandang dalam melihat permasalahan diatas akan makin baik karena permasalahan-permasalahan saat ini umumnya multidimensional dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga perlu dilihat dan dilakukan pengkajian terhadap hal-hal sebagai berikut:

a) Semangat bersatu menjadi bangsa. Penurunan semangat bersatu untuk menjadi bangsa sangat kontras dengan zaman kemerdekaan dimana masyarakatnya bersatu

padu bahu membahu melawan penjajah. Pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya dari setiap lembaga pemerintah adalah mengapa pada masa lalu masyarakat bersatu bisa bersatu padu melawan penjajah tetapi masyarakat sekarang tidak sebagai bentuk integral karakter bangsa Indonesia.

b) Kerukunan/toleransi. Penurunan kerukunan/toleransi beragama ditandai dengan munculnya konflik horizontal bernuansa SARA yang disebabkan oleh paham radikalisme. Namun demikian hal tersebut tidak terjadi pada masa perang kemerdekaan sehingga topik pembahasan pada bidang kerukunan/toleransi adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi.

c) Semangat gotong royong. Semangat gotong royong saat ini hanya mungkin bisa ditemui di daerah pedesaan ataupun daerah yang jauh dari kota besar sehingga perlu diadakan evaluasi mengapa terjadi degradasi tersebut, khususnya di kalangan generasi muda.

d) Semangat pantang menyerah. Lambatnya bangsa Indonesia keluar dari berbagai permasalahan secara jelas menunjukkan bahwa semangat pantang menyerah bangsa Indonesia terjadi degradasi sehingga perlu dicarikan jawaban mengapa kondisi tersebut terjadi dan mengapa pantang menyerah sebagai karakter bangsa telah terdegradasi di kalangan generasi muda.

e) Musyawarah/mufakat. Semangat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat saat ini tidak dijadikan sebagai media penyelesaian dalam perselisihan, khususnya dikalangan generasi muda. Hal yang telah menyimpang dari kultur dan karakter bangsa Indonesia ini perlu dikaji mengapa bisa terjadi.

- 2) Tiap-tiap lembaga pemerintah menyeminarkan hasil temuan tersebut kepada perwakilan elemen masyarakat dan generasi muda untuk menjaring masukan dan tanggapan sehingga dicapai hasil yang lebih optimal.
- 3) Setiap lembaga pemerintah melakukan studi di lapangan tentang seberapa jauh temuan permasalahan tersebut telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dikalangan generasi muda sesuai dengan sudut pandang lembaga pemerintah masing-masing.
- 4) Setiap lembaga pemerintah bertanggung jawab terhadap penggabungan seluruh hasil yang telah didapatkan di tiap lembaga untuk dirumuskan menjadi solusi terbaik menghadapi fenomena permasalahan tersebut.

b. Tentukan instansi mana yang berkompeten membidangnya. Agar tidak terjadi saling tunggu dan saling menyalahkan, maka Presiden perlu meningkatkan peran BPIP sebagai penanggung jawab untuk membidangi upaya meningkatkan semangat bersatu, kerukunan/toleransi, semangat gotong royong, semangat pantang menyerah dan musyawarah mufakat yang ada dikalangan generasi muda khususnya dan pada umumnya seluruh masyarakat, yang secara profesional mampu menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai sarana untuk membangkitkan jati diri sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia. BPIP perlu menjadi *leading sector* meningkatkan karakter generasi muda sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, melalui pembentukan program-program penguatan karakter yang muda dipahami dan dimengerti. Program-program ini dapat disosialisasikan melalui berbagai bentuk dan media yang menarik perhatian para generasi muda.

c. Bangun komunikasi politik dengan publik. Lembaga-lembaga pemerintah yang telah ditunjuk oleh Presiden sebagai penanggung jawab untuk memantapkan karakter bangsa, mengambil langkah untuk menangani upaya mengembalikan Jati diri Bangsa Indonesia atas dasar

permasalahan yang telah ditemukan. Dalam melakukan sosialisasi perlu disertai langkah-langkah atau tindakan serta strategi yang benar agar dapat mengembalikan Jati diri Bangsa Indonesia. Agar sosialisasi dan pembangkitan semangat ini dapat optimal, maka perlu adanya regulasi yang dibuat Presiden dan DPR untuk memberikan dasar hukum serta dapat menjamin kegiatan yang dilakukan tidak menyimpang dari esensi atau tujuan semula. Agar terjadi interaksi yang seimbang antara kebutuhan dan solusi yang disiapkan, maka Pemerintah perlu melakukan beberapa hal yaitu:

- 1) Aspek ideologi.
 - a) Menghidupkan kembali penataran P4 atau sejenisnya di dalam pendidikan sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dengan pola penataran yang interaktif dan dialogis.
 - b) Meningkatkan peran keberadaan BP4P atau sejenisnya yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan P4 dan diawasi oleh orang-orang yang kompeten, mandiri dan kapabel.
 - c) Membuat dan menyebarkan poster/booklet/leaflet berbentuk karikatur melalui berbagai media yang berisi contoh-contoh konkret sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
 - d) Menganjurkan gerakan menghidupkan dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila atau “gerakan cinta Pancasila” di kalangan anak muda di wilayah pelosok, terpencil dan perbatasan sehingga memperkuat basis nasionalisme bangsa.

- 2) Aspek politik
 - a) Meningkatkan peluang dan keleluasaan bagi daerah untuk mengurus dirinya sendiri secara mandiri untuk meningkatkan otonomi daerah dalam kerangka NKRI dalam rangka mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

- b) Memberikan otonomi khusus kepada daerah yang dianggap memiliki faktor historis / kesejarahan yang unik agar supaya tetap berada dalam kerangka NKRI.
- c) Mengajak pihak-pihak yang melakukan gerakan memisahkan diri dari wilayah Indonesia untuk berunding dengan cara persuasif dalam suasana kondusif untuk mencari alternatif solusi / jalan pemecahannya.
- d) Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh masyarakat di wilayah Indonesia agar tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak mudah untuk dihasut untuk melakukan gerakan memisahkan diri.
- e) Menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan LSM untuk bersama-sama memperkokoh dan memperkuat nasionalisme demi menjaga keutuhan bangsa.

3) Aspek ekonomi

- a) Melaksanakan program “cinta produk Indonesia” kepada seluruh generasi muda Indonesia khususnya, dengan membeli produk-produk yang berasal dari Indonesia.
- b) Melaksanakan “program cinta Rupiah” kepada seluruh generasi muda Indonesia khususnya dengan tetap menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksi.
- c) Menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada koperasi untuk mengimbangi ekonomi kapitalisme yang menekankan globalisasi dan perdagangan bebas.
- d) Melakukan pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) domestik untuk menghadapi kekuatan perusahaan multinasional dengan kekuatan modal raksasa.

- e) Memperkuat posisi tawar pemerintah ketika melakukan perundingan ekonomi dengan negara asing dan lembaga donor internasional demi kepentingan nasional Indonesia.
- 4) Aspek sosial budaya
- a) Melaksanakan gerakan “cinta bahasa Indonesia” pada seluruh generasi muda Indonesia khususnya dengan selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap percakapan dan pembicaraan di kehidupan sehari, baik forum resmi maupun tidak resmi.
- b) Menertibkan penamaan/istilah pada nama kantor, nama lembaga, dan nama produk yang memakai bahasa asing untuk diubah menjadi bahasa Indonesia.
- c) Mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak muda tentang gaya hidup, gaya makan, gaya minum, dan gaya berpakaian yang mencerminkan budaya Indonesia dan tidak meniru budaya asing.
- d) Menggerakkan kembali semangat gotong royong, tenggang rasa, mementingkan kepentingan umum, dan budaya kolektif lainnya dan meninggalkan budaya individu yang tidak mencerminkan karakter budaya bangsa.
- e) Melakukan gerakan bangga menjadi warga negara Indonesia, bangga berbudaya Indonesia, bangga hidup di Indonesia, bangga memiliki jati diri Indonesia, dan bangga menjadi Indonesia.
- 5) Aspek pertahanan dan keamanan. Meningkatkan rasa bela negara para generasi muda dengan mengoptimalkan pembentukan komponen cadangan yang diprioritaskan bagi para generasi muda. Hal ini bertujuan agar para generasi muda dapat memaknai nilai-nilai karakter bangsa yang memiliki bela negara dalam menghadapi berbagai dinamika ancaman. Disamping itu, Panglima TNI dan

Kapolri dapat membekali pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi kepada para Babinsa dan Babinkamtibmas. Tujuannya adalah agar mampu memanfaatkan kemampuannya sebagai sarana komunikasi edukatif kepada masyarakat, maupun melatih para generasi pemuda di wilayah binaannya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai sarana yang bermanfaat dalam mendukung kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



BAB IV PENUTUP

16. **Simpulan.** Kewaspadaan nasional dapat diartikan sebagai rasa yang sangat militan terhadap rasa nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa serta bangga memiliki satu bangsa yang memiliki kesiapan dan kesiapsiagaan yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman yang dapat menceraikan beraikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah paham radikalisme yang saat ini dirasakan semakin massif perkembangannya dengan didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, khususnya di kalangan generasi muda yang rentan terpapar paham radikal. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk lebih dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan diatas, dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

- a. Keberadaan multikultur bangsa Indonesia, ancaman disintegrasi bangsa dapat menjadi sebuah ancaman faktual yang sewaktu-waktu terjadi. Hal ini disebabkan pemahaman hakekat ancaman dalam rangka deteksi dan peringatan dini terhadap kewaspadaan nasional oleh masyarakat bangsa Indonesia, khususnya para generasi muda mulai luntur. Terlebih saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak globalisasi. Munculnya sikap individualisme dan hilangnya nilai-nilai persatuan dikalangan generasi muda diprediksi sangat dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi demikian sangat rentan oleh masuknya paham-paham radikal dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi muda. Sehingga ancaman nyata seperti paham radikalisme yang mengancam terhadap jati diri bangsa tidak dapat dipahami secara mendalam. Oleh sebab itu, upaya deteksi dini dan peringatan dini melalui pembentukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi muda harus terus digalakkan. Pemerintah perlu hadir secara nyata mengarahkan para pemuda membentuk suatu wadah organisasi kemanusiaan yang mampu menyibukkan para generasi muda ke arah positif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa kebangsaan,

penguatan paham kebangsaan sesuai makna Sumpah Pemuda 1928, peningkatan semangat kebangsaan dan terbentuknya kualitas wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda. Sehingga para generasi muda dapat menjadi motor penggerak masyarakat di lingkungannya untuk tetap peduli terhadap hakekat ancaman yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, khususnya ancaman paham radikalisme.

b. Saat ini kesadaran masyarakat Indonesia sudah sangat menurun bahkan paham kebangsaan seolah-olah menjadi tidak relevan dalam berbagai wacana membangun bangsa karena terdistorsi praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Menurunnya paham kebangsaan masyarakat Indonesia dapat disaksikan pada indikator-indikator permasalahan Ipoleksosbudhankam yang mengarah kepada primordialisme sempit dari masing-masing individu, kelompok, kedaerahan dan agama yang bermuara terhadap aksi-aksi radikalisme. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi terhadap pola pikir generasi muda, yang pada kenyataannya sangat rentan terpapar paham radikalisme. Dalam sub pasal data dan fakta diatas dijelaskan bahwa sejak tahun 2000 hingga saat ini BNPT mencatat 85% generasi milenial sangat rentan terpapar paham radikalisme, dimana 47,3 % pelaku tindak terorisme dari kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya sikap primordialisme sempit yang dipertontonkan oleh oknum-oknum penyelenggara negara, elite politik, tokoh agama dan komponen bangsa lainnya. Sehingga untuk menghilangkan sikap primordialisme di kalangan generasi muda sebagai suatu tindakan cegah awal guna peningkatan kewaspadaan nasional, pemerintah melalui BPIP sebagai instansi yang berwenang untuk mengumpulkan seluruh sejarah perjuangan bangsa dan mensosialisasikannya kepada seluruh generasi muda. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang seperti media sosial dan sebagainya. Sejarah perjuangan bangsa dapat dikemas ke dalam bentuk aplikasi yang menarik bagi para generasi muda seperti sebuah permainan (game), iklan edukatif sampai dengan mengadakan berbagai event dengan tema perjuangan bangsa.

c. Di Satu sisi, semangat kebangsaan yang ada saat ini tidak ditransformasikan kepada bagian lain secara terpola sebagai perekat kesatuan dan telah mengancam kepada pluralisme atau kebhinekaan bangsa Indonesia. Meningkatnya konflik dengan kekerasan yang saat ini mengalami kenaikan merupakan fakta rapuhnya jiwa dan semangat kebangsaan masyarakat Indonesia. Demikian juga dikalangan generasi muda, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah membawa mereka rentan terhadap berbagai provokasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Banyak generasi muda yang kehilangan jati diri dan karakter bangsa sebagai kesadaran integral bangsa Indonesia dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila. Kondisi demikian, tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh paham-paham radikal, bahkan yang mengarah kepada aksi terorisme. Untuk itu pemerintah mewajibkan kepada tiap-tiap instansi/lembaga pemerintah yang berkompeten untuk terus mengupayakan pemantapan karakter sebagai suatu kesadaran integral dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai tangkal awal terhadap kewaspadaan nasional, mencari permasalahan utama hilangnya jati diri dan karakter bangsa dikalangan generasi muda melalui studi di lapangan, selanjutnya dikemas sebagai permasalahan untuk diseminarkan. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi pemecahan yang terbaik meningkatkan jati diri dan karakter bangsa di kalangan generasi muda sebagai upaya tangkal awal terhadap kewaspadaan nasional. Dimana pada muaranya para generasi muda memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menangkal paham radikalisme.

17. **Rekomendasi.** Berdasarkan kesimpulan diatas, maka untuk lebih meningkatkan kewaspadaan nasional guna memantapkan integrasi bangsa yang oleh penulis dibatasi pada pencegahan berkembangnya paham radikalisme di kalangan generasi muda, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Mendikbud Ristek, perlu membuat regulasi seperti Peraturan Menteri tentang perubahan kurikulum pendidikan nasional dengan memasukkan mata pelajaran diskusi interaktif khususnya sekolah tingkat atas dan perguruan tinggi. Adapun pokok bahasan mata pelajaran dalam diskusi

interaktif ini dititik beratkan kepada pemahaman 4 (empat) konsensus nasional sampai dengan dinamika hakekat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan para generasi muda terhadap 4 (empat) konsensus nasional dan hakekat ancaman, yang *outcome*-nya para generasi muda dapat menjadi motor penggerak mensosialisasikan hakekat ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia kepada masyarakat di lingkungannya, termasuk ancaman paham radikalisme sebagai ancaman nyata dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang multikultural.

b. Presiden, dengan segala kewenangan yang dimilikinya disarankan dapat membuat Peraturan Presiden sebagai dasar bagi para penegak hukum untuk memberikan tindakan terhadap individu masyarakat maupun kelompok-kelompok yang selalu menghembuskan paham intoleransi sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara adil dan bijaksana. Hal ini bertujuan agar bentuk-bentuk primordialisme sempit dari individu, kelompok, kedaerahan dan agama yang selama ini menjadi pokok pangkal timbulnya aksi radikalisme dapat diminimalisir.

c. Pemerintah yang dimotori oleh Kemenkominfo, perlu membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Kementerian terkait dan *stakeholder lainnya* untuk memfasilitasi event atau kegiatan kompetisi pembuatan konten-konten yang berkaitan dengan 4 (empat) konsensus nasional bagi para generasi muda secara *bottom up* secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Hal ini bertujuan untuk membentuk jati diri dan karakter generasi muda yang memiliki sikap, semangat terhadap wawasan kebangsaan. Disamping itu, para generasi muda akan disibukkan untuk membuat konsep konten-konten yang menarik untuk diperlombakan, setidaknya akan meminimalisir kesempatan untuk membuka konten-konten yang bersifat provokasi dari paham radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Kemenhan RI, 2014. Doktrin Pertahanan Negara
- Kemendagri, 2022. Peta Konflik Sosial Di Daerah, disampaikan pada pelatihan peningkatan kepemimpinan perempuan perdamaian pada tanggal 28 Maret 2022
- Lemhannas, 2022. Materi Pokok Sub Bidang Studi Pancasila
- Lemhannas, 2022. Materi Pokok Sub Bidang Studi UUD NRI 1945
- Lemhannas, 2022. Materi Pokok Sub Bidang Studi Bhineka Tunggal Ika
- Lemhannas, 2022. Materi Pokok Sub Bidang Studi NKRI
- Lemhannas, 2022. Materi Pokok Sub Bidang Studi Kewaspadaan Nasional
- Lemhannas, 2022. Materi Pokok Sub Bidang Studi Ketahanan Nasional
- Lemhannas, 2022. Materi Pokok Sub Bidang Studi Wawasan Nusantara
- Maleong, Lexy, 2014. Metode Penelitian kualitatif. Bandung
- Nugroho Notosusanto. 1979. Sejarah Demi Masa Kini. Jakarta. UI-Press
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung; Alfabeta
- Sugito, A.T. 1980. Depdikbud, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang RI No. 7 tahun 2012 tentang Konflik Sosial
- Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Permendagri No. 71 tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK)

JURNAL

- Hartono, Dwi, 2020. Fenomena Kesadaran Bela Negara di era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhannas RI
- Meynawati, Latifah, 2021. Implementasi Nilai-nilai Pancasila Bagi Generasi Muda di dalam Kehidupan sehari-hari. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

Untuk memahami Paradigma Human Security dan relevansinya bagi Indonesia dapat dibaca pada Anak Agung Banyu Perwita, "Human Security dalam Konteks Global dan Relevansinya Bagi Indonesia, Jurnal Analisis CSIS, Tahun XXXII/2003, No. 1

INTERNET

BNPT. Lindungi generasi Muda Dari Paham Radikal, BNPT Mengajak Pendidik Agama Sebarkan Pesan Toleransi dan perdamaian Kepada Anak, diakses melalui <https://www.bnpt.go.id/lindungi-generasi-muda-dari-paham-radikal-bnpt-ajak-pendidik-agama-sebarkan-pesan-toleransi-dan-perdamaian-kepada-anak> pada 12 April 2022

BNPT, 85% Kaum Milenial Rentan Terpapar Radikalisme dan Terorisme, diakses melalui <https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/85-kaum-milenial-rentan-terpapar-radikalisme-dan-terorisme/> pada 12 April 2022

Bps.go.id. Inflasi terjadi pada Maret 2022 sebesar 0,66%, Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 1,86%, diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/04/01/1859/inflasi-terjadi-pada-maret-2022-sebesar-0-66-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-merauke-sebesar-1-86-persen-.html> pada 14 April 2022

Demokrasi yang terjun bebas, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, diakses melalui <https://ukwms.ac.id/demokrasi-yang-terjun-bebas/> pada 12 April 2022

Detik.com. Pengertian Sukurisme, Chauvinisme, primordialisme dan ekstremisme, diakses melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5641700/pengertian-sukurisme-chauvinisme-primordialisme-dan-ekstremisme> pada 10 Mei 2022

Dpr.id, 2021. Komisi IV Tinjau Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Batu bara di Kaltim, diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36496/t/Komisi+IV+Tinjau+Kerusakan+Lingkungan+Akibat+Penambangan+Batu+Bara+di+Kaltim> pada 12 April 2022

Duniaenergi.com. Pasar Energi Masih Akan Didominasi Minyak, Gas dan Batubara hingga 2035, diakses melalui <https://www.dunia-energi.com/pasar-energi-masih-akan-didominasi-minyak-gas-dan-batubara-hingga-2035/> pada 14 April 2022

Kompas.com. Waspada, Radikalisme Sasar Generasi Muda Indonesia, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/20/124608765/waspada-radikalisme-sasar-generasi-muda-indonesia?page=all> pada 1 Maret 2022

Kumparan.com. Apakah Kultur Indonesia Bertransformasi menjadi Individualis ?, diakses melalui <https://kumparan.com/talumaulana07/apakah-kultur-indonesia-bertransformasi-menjadi-individualis-1vTCUZTAhuU/3> pada 22 April 2022

Modul tes CPNS, 2021. Radikalisme, diakses melalui <http://klikcpns.com/doc/MODUL%20KLIK%20CPNS%20-%20ANTI%20RADIKALISME.pdf> pada 28 Maret 2022

Ruangguru.com. Peristiwa Kontemporer Dunia, diakses melalui <https://www.ruangguru.com/blog/peristiwa-kontemporer-dunia-perpecahan-cekoslovakia> pada 14 April 2022

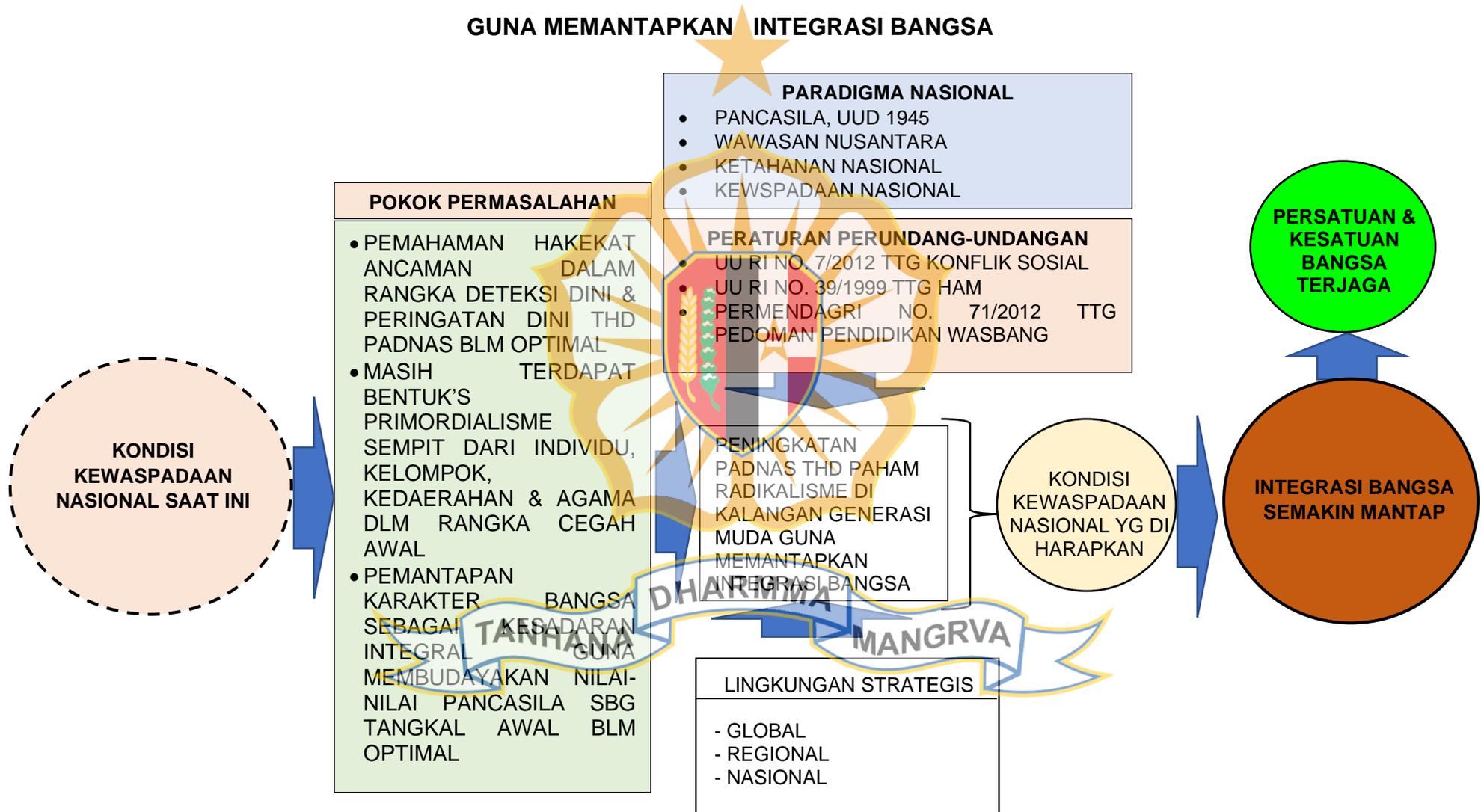
Wartaekonomi. Dihajar massa saat demo mahasiswa, Begini Sepak terjang Sosok Ade Armando, diakses melalui <https://wartaekonomi.co.id/read408007/dihajar-massa-saat-demo-mahasiswa-begini-sosok-dan-sepak-terjang-ade-armando-bukan-kaleng-kaleng> pada 12 April 2022

Yusup Nugraha, Sifat Individualisme di Kalangan Masyarakat, Diakses tanggal 31 Agustus 2015, lihat : <http://yusupnugraha94.blogspot.com/2013/12/individualis.html>



ALUR PIKIR

**PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP PAHAM RADIKALISME DI KALANGAN GENERASI MUDA
GUNA MEMANTAPKAN INTEGRASI BANGSA**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA POKOK

1. NAMA : ABD. HARIS, S.I.P
2. PANGKAT/KORP/NRP : KOLONEL KAV/1920036480969
3. JABATAN TERAKHIR : PABANDOKJUK SDIRDOK
KODIKLATAD
4. TANGGAL LAHIR : 29-09-1969
5. TEMPAT LAHIR : MAKASSAR
6. AGAMA : ISLAM
7. GOLONGAN DARAH : O

PENDIDIKAN

a. PENDIDIKAN UMUM

- 1) SEKOLAH DASAR TAHUN 1983
- 2) SMP TAHUN 1986
- 3) SMA TAHUN 1989
- 4) S1 TAHUN 1997

b. PENDIDIKAN MILITER

- 1) DIKBANGUM
 - a) AKMIL TAHUN 1992
 - b) SUSARCAB KAV TAHUN 1993
 - c) SESLAPA KAV TAHUN 2002
 - d) SESKOAD TAHUN 2007
 - e) SESKO TNI TAHUN 2017
- 2) DIKBANGSPES
 - a) SUSDANKI TAHUN 1996
 - b) SUS PA INTEL TAHUN 1997

c)	SUS DANYON	TAHUN	2008
d)	SUS DANDIM	TAHUN	2010

RIWAYAT JABATAN

a.	PAMA PUSSENKAV	TAHUN	1992
b.	DANTON 3 KISER 72 YONKAV 7/SERSUS	TAHUN	1993
c.	DANTON 2 KISER 72 YONKAV 7/SERSUS	TAHUN	1994
d.	KASI 3/PERS YONKAV 7/SERSUS	TAHUN	1995
e.	KASI 1/INTEL YONKAV 7/SERSUS	TAHUN	1997
f.	DANKISER 72 YONKAV 7/SERSUS	TAHUN	1997
g.	DANKISER 74 YONKAV 7/SERSUS	TAHUN	1998
h.	DANKISER 73 YONKAV 7/SERSUS	TAHUN	1998
i.	PASITER DIM 0503/JB	TAHUN	1999
j.	DANRAMIL 04/CKR	TAHUN	2000
k.	GUMIL GOL VI DEPTIKSTAF PUSDIKKAV	TAHUN	2002
l.	KASUBDEP STAF DEPTIKSTAF PUSDIKKAV	TAHUN	2004
m.	WADAN YONKAV 6/SERBU DAM I/BB	TAHUN	2004
n.	KASDIM 0315/KEPRI REM 022/PT	TAHUN	2005
o.	PAMEN DAM I/BB (DIK SESKOAD)	TAHUN	2007
p.	KADEPTIKSTAF PUSDIKKAV	TAHUN	2007
r.	KADEPJAT PUSDIKKAV	TAHUN	2009
s.	DANYONKAV 2/SERBU DAM IV/DIP	TAHUN	2009
t.	DANDIM 0721/BLORA	TAHUN	2011
u.	KABAG BINSAT SDIRBINPUANTER	TAHUN	2014
v.	KABAG BINSAT SDIRBINDIKLAT PUSTERAD	TAHUN	2015
w.	DIRBINDIKLAT PUSSENKAV	TAHUN	2016
x.	PAMEN DENMABESAD (DIK SESKO TNI)	TAHUN	2017
y.	ASTER KASDAM XIII/MDK	TAHUN	2018
z.	PAMEN AHLI BIDANG HUKUM DAN HUMANITER PANGDAM XIV/HSN	TAHUN	2020
aa.	PABANDOKJUK SDIRDOK KODIKLATAD	TAHUN	2021

RIWAYAT PENUGASAN

1. DALAM NEGERI

-

2. LUAR NEGERI.

- KKLN SESKO TNI (TIONGKOK)

TAHUN 2017

DATA KELUARGA

1. NAMA LENGKAP ISTRI : AIDA MELIYANA ELVA

2. JUMLAH ANAK : 2 (DUA)

